



P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ZULWAHYU A. USMAN SJAHA Bin DEDE NUCH
Tempat lahir	: Ternate
Umur/tanggal lahir	: 50 tahun / 10 Nopember 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Baru RT 07, RW 04, Kelurahan Kasturian, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan	: S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : RAHMAN MAHFUD, SH., SAID TEAPON, SH., YULIA DEWANTY MAHFUD, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada *Law Office* MAHFUD & PARTNERS yang beralamat di Jalan Ketilang / Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Sentiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 yang telah di daftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 372/SK.HK.01/12/2020/PN.Tte. tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH BIN DEDE NUCH**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi secara Bersama-sama memperkaya orang lain, diri sendiri atau**

Halaman 2 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



suatu korporasi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH BIN DEDE NUCH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Korupsi secara Bersama-sama menguntungkan orang lain, diri sendiri atau suatu korporasi “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** subsidier **6 (Enam) bulan** kurungan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 432.930.067,- (Empat ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** kurungan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

No	Jumlah	Barang/Dokumen	Atas Nama pemilik	Keterangan
1.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
2.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
3.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RSUD MABA	DG 8100 HT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4614 T
5.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4620 T
6.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MOH. KANDUNG	DG 2817 TB
7.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET H	DG 2842 TB
8.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4644 T
9.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AYU NISMAWATI	DG 2851 TA
10.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARNI	DG 5260 T
11.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	BAMBANG SLAMET SISWANTO	DG 2128 TD
12.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RONAL TOLOAN	DG 1415 T
13.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FEBRI RAHARDIANTO	DG 2206 TD
14.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURSIA SALEH	DG 1419 T
15.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI DESIYANTI	DG 2293 TD
16.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANADA ROSY ISWAHYUDI	DG 2340 TD
17.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURSANTI ADE	DG 5033 TA
18.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMIT PASSY	DG 3987 TB
19.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	RASITO	DG 6337 T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
20.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDURAHMAN HAIRUDIN	DG 3904 TB
21.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IBRAHIM MALIK	DG 3902 TB
22.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SALMAN AL FARIS	DG 3903 TB
23.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI WAHYUNI	DG 3990 TB
24.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASIAH	DG 3992 TB
25.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RIFKA PUTRI PRATAMI	DG 2012 TD
26.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RITA SALIHI	DG 5040 TA
27.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMAIL DJURUBASA	DG 5045 TA
28.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAMIUN FACATLE	DG 2014 TD
29.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DESA TELAGA JAYA	DG 2339 HT
30.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD DJAILAN	DG 5041 TA
31.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURWADI	DG 2011 TC
32.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UCI SANUSI	DG 2001 TC
33.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTOMO AYUB	DG 3997 TB
34.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	CUCU ASMANA	DG 3994 TB
35.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah	RAIS GUAMO	DG 2005 TC

Halaman 5 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
36	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KASBUN	DG 3995 TB
37	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	BOBI TUNANG	DG 2008 TC
38	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUHARTI MARSIDIK	DG 3996 TB
39	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARMEON KALAKA	DG 2022 TD
40	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NENENG GITA WAHYUNI	DG 2068 TD
41	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LASER PANDAPOTAN GULTOM	DG 2010 TC
42	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAMID SENEN	DG 3988 TB
43	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ATI KUESTINAH	DG 2006 TC
44	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LATIFA DJAILAN	DG 3991 TB
45	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAMANIA PAUWAH,S.AG	DG 3998 TB
46	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	EKO SUDARMASIH	DG 2004 TC
47	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RASMIYEM	DG 2007 TC
48	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAIMAN	DG 2003 TC
49	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SATUNI	DG 2032 TD
50	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YOHNIS TERU TERU	DG 2009 TC
51	1 (satu) lembar	Surat Ketetapan	SLAMET ARIFIN	DG 2046

Halaman 6 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		TD
52	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURNOMO	DG 2086 TD
53	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDUL AZIZ MUZARAB	DG 1211 T
54	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RISNO	DG 3961 TB
55	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YARNI SURYANA TEA	DG 3962 TB
56	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRIYANI	DG 3967 TB
57	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMIT HI.MA'BUD	DG 3974 TB
58	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WAGIYAH	DG 2031 TD
59	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHTAR HAJI MUHAMAD	DG 2047 TD
60	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARWAN HASAN	DG 3712 TB
61	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YELFIANA SUSU	DG 3775 TB
62	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARSELUS MOI LEUWAYAN	DG 3931 TB
63	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMAIL DJURUBASA	DG 3717 TB
64	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADRI POUI	DG 3872 TB
65	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HERUN PURNAMI	DG 3934 TB
66	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARDI MAULANA	DG 3754 TB

Halaman 7 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KENG KAMARIBA	DG 2103 TD
68	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	REYNOLD ANDRE TUMALANG	DG 2104 TD
69	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DARLISA HI.ALI	DG 2093 TD
70	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RUBIYATI	DG 2094 TD
71	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUGENG	DG 3868 TB
72	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANDI YANI	DG 3713 TB
73	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YOFENUS M. BUDIMAN	DG 2059 TD
74	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MAJID DJINA	DG 2126 TD
75	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISBAT HAMJAH	DG 2073 TD
76	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARINUS WAROBAL	DG 3927 TB
77	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ALI MUSOLIH	DG 3925 TB
78	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAIFUL SETIAWAN	DG 3937 TB
79	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FAESAL ALBAR	DG 3944 TB
80	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HENGKI KAOI	DG 3941 TB
81	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANWAR M. NUR	DG 3953 TB
82	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	SRI RAHAYU	DG 2108 TD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
83	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET	DG 2110 TD
84	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WANDONO	DG 2113 TD
85	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUSTINA MUJIB	DG 2117 TD
86	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUPARMIWATI	DG 2120 TD
87	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MESERI	DG 2124 TD
88	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADE SALMAN,SKM.M,KES	DG 3774 TB
89	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KARTINI	DG 3867 TB
90	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PARWATI	DG 2080 TD
91	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WASIS AMANTO	DG 2083 TD
92	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RETNO	DG 2085 TD
93	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUKARDI SONINGA	DG 2123 TD
94	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SEFETUNA MOTJOR	DG 3776 TB
95	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WENAS SALASA	DG 3871 TB
96	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YAPET MANGENGEDE BARAHAMA	DG 3707 TB
97	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RISTINA STIORINI	DG 3870 TB
98	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah	NONCE DIAS	DG 3694 TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
99	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FITRIANI HUSIN	DG 2144 TD
100	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LA ODE MAZRIN	DG 2190 TD
101	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HASIM LA ABU	DG 2150 TD
102	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YANCE ANO	DG 2148 TD
103	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MELKIANUS NABI	DG 2149 TD
104	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DESA TANURE	DG 2007 TP
105	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAIKAL SYUKUR	DG 2084 TD
106	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SENI SURYANI	DG 2116 TD
107	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WIDOYONO	DG 2207TD
108	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAKARTIKA	DG 2107 TD
109	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	EDY HARTONO	DG 2114 TD
110	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARIFATU HASANA	DG 2118 TD
111	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	THOYIBAH	DG 2119 TD
112	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IRWANTO KAHAR	DG 2154 TD
113	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUS SUYATNO	DG 2115 TD
114	1 (satu) lembar	Surat Ketetapan	ADI SUNARTO	DG 2079

Halaman 10 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		TD
115	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MAHRONI	DG 2125 TD
116	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUAIB H. TAMSIL	DG 2082 TD
117	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASEHAT	DG 2139 TD
118	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGNESIA ITA PURNAMASARI	DG 3721 TB
119	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDUL KADER SALASA	DG 2122 TD
120	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MIAN	DG 3968 TB
121	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YERMIAS Y LAUMBUR	DG 2011 TD
122	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD FAHROZI	DG 2015 TD
123	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FAIDIN MUHAMAD	DG 2016 TD
124	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HIRWAN A. RAHMAN	DG 2013 TD
125	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET MULYANTO	DG 2034 TC
126	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURDIN HADI	DG 1409 T
127	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SOLATUN	DG 2201 TD
128	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WILIAM LEMONTJINA	DG 3970 TB
129	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASIRUN	DG 3972 TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WIDODO	DG 2196 TD
131	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	TONY HARTONO	DG 6331 T
132	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHAMAD CHIRUL ANWAR	DG 8099TU
133	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YUDI SETIAWAN EFENDI	DG1801 TU
134	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WANISA UAT	DG 1297 T
135	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD BARMAWI	DG 5131 T
136	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUPRIADI UMAR	DG 5380 T
137	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UGENG SETIONO	DG 8417 T
138	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	JOKO WAHAB	DG 8103 TU
139	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADNAN HASANUDIN, ST	DG 1402 T
140	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUSANA	DG 8001 UT
141	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PONIMIN, SPD	DG 1403 T
142	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTIYAH	DG 8187 T
143	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	H. SITI MAWANI	DG 1407 T
144	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI ASTINI	DG 8002 UT
145	1 (satu) lembar Asli1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	HJ. SITI MAWANI	DG 8506 T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
146	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LASANE LAHAJI	DG 8506 T
147	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAMLY MARASABESSY	DG 1006 UT
148	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTRISMAN	DG 8510 T
149	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAHRAN UAT	DG 2206 T
150	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YANTO SUNARYO	DG 2937 TB
151	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN	DG 2203
152	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SYUKUR WASHAB	DG 5706 T
153	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHAMAD ANSAR	DG 2779TB
154	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SABINGATUN	DG 2516 T
155	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURIYONO	DG 6207 7
156	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURNOMO	DG 5488 T
157	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUS SALIM	DG 5334 T
158	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WAHYU NINGSIA BHRUDIN	DG 2760 TA
159	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	QOBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
160	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 5)	QUBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
161	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah	KASTAM	DG 2331 TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
162	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MISITUN	DG 8102 T
163	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MANOPO ABD KADIR	DG 1210 T
164	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PEMERINTAH KAB. HALTIM	DG 134 HT
165	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UDIN ALI	DG 5075 T
166	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	VERA TANDEAN	DG 6018 T
167	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HENDRI PAIDUN	DG 2414 TB
168	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 160 HT
169	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 157 HT
170	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5280 HT
171	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5283 HT
172	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5281 HT
173	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5278 HT
174	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUKIR	DG 2966 TA
175	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	SAMIADI	DG 8052 T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
176	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IKRAM SYAFI	DG 5428 T
177	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHTAR TOMAIDI, SE	DG 8509 T
178	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAMID SABAN	DG 5390 T
179	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	GAZALI M TAHIR	DG 25II TB
180	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARNI AMINUDIN	DG 2762 TA
181	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARSINO	DG 2906 TA
182	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AAN RIYADI. S.SOS	DG 2722 TB
183	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SALMA YUSUF	DG 2530 TA
184	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NAHROWI	DG 8005 UT
185	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WADUD KIPU	DG 2074 TD
186	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SRIANINGSIH	DG 1401 T
187	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BAMBANG HARYANTO, Spd	DG 1400 T
188	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
189	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	RSUD MABA	DG 8100 HT
190	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
191	1 (satu) lembar	Surat Ketetapan	BPKAD KAB. HALTIM	DG 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	copy scan	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)		TP
192	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BPKD HALTIM	DG 1004 TP
193	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ABDULLAH MOLOGOTU	DG 1412 T
194	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ARIS BUDIYONO	DG 1007 UT
195	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	LATIFA DJAILAN	DG 1413 T
196	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	DINAS KESEHATAN KAB. HALTIM	DG 9001 TP
197	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MUNIR Hi. SALIM	DG 1418 T
198	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SEKRETARIAT DPRD KAB. HALTIM	DG 1006 TP
199	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SEKRETARIAT DPRD KAB. HALTIM	DG 1007 TP
200	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SAFRI ANDI	DG 1012 UT
201	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MOHAMAD ALI SODIKIN	DG 1423 T
202	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MUSLIM DJURUBASA	DG 1429 T
203	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SENDI PAIDUN	DG 1412 T
204	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MAJID DJINA	DG 1437 T
205	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	AAN RIYADI	DG 1438 T
206	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ISMAIL DJURU BASA	DG 1452 T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MISNAINI	DG 1461 T
208	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	YORDAN LABUANG	DG 1466 T
209	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BURHAN HI. ADAM	DG 1467 T
210	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
211	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
212	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RSUD MABA	DG 8100 HT
213	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4614 T
214	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4620 T
215	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MOH. KANDUNG	DG 2817 TB
216	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET H	DG 2842 TB
217	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4644 T
218	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AYU NISMAWATI	DG 2851 TA
219	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARNI	DG 5260 T
220	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	BAMBANG SLAMET SISWANTO	DG 2128 TD
221	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RONAL TOLOAN	DG 1415 T
222	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	FEBRI RAHARDIANTO	DG 2206 TD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
223	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURSIA SALEH	DG 1419 T
224	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI DESIYANTI	DG 2293 TD
225	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ANADA ROSY ISWAHYUDI	DG 2340 TD
226	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURSANTI ADE	DG 5033 TA
227	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMIT PASSY	DG 3987 TB
228	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RASITO	DG 6337 T
229	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDURAHMAN HAIRUDIN	DG 3904 TB
230	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IBRAHIM MALIK	DG 3902 TB
231	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SALMAN AL FARIS	DG 3903 TB
232	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI WAHYUNI	DG 3990 TB
233	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASIAH	DG 3992 TB
234	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RIFKA PUTRI PRATAMI	DG 2012 TD
235	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RITA SALIHI	DG 5040 TA
236	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMAIL DJURUBASA	DG 5045 TA
237	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAMIUN FACATLE	DG 2014 TD
238	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah	KANTOR DESA TELAGA JAYA	DG 2339 HT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		
239	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD DJAILAN	DG 5041 TA
240	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURWADI	DG 2011 TC
241	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UCI SANUSI	DG 2001 TC
242	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTOMO AYUB	DG 3997 TB
243	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	CUCU ASMANA	DG 3994 TB
244	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAIS GUAMO	DG 2005 TC
245	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KASBUN	DG 3995 TB
246	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	BOBI TUNANG	DG 2008 TC
247	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUHARTI MARSIDIK	DG 3996 TB
248	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARMEON KALAKA	DG 2022 TD
249	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NENENG WAHYUNI GITA	DG 2068 TD
250	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LASER PANDAPOTAN GULTOM	DG 2010 TC
251	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAMID SENEN	DG 3988 TB
252	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ATI KUESTINAH	DG 2006 TC
253	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LATIFA DJAILAN	DG 3991 TB
254	1 (satu) lembar	Surat Ketetapan	RAMANIA	DG 3998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PAUWAH,S.AG	TB
255	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	EKO SUDARMASIH	DG 2004 TC
256	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RASMIYEM	DG 2007 TC
257	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAIMAN	DG 2003 TC
258	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SATUNI	DG 2032 TD
259	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YOHNIS TERU TERU	DG 2009 TC
260	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET ARIFIN	DG 2046 TD
261	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURNOMO	DG 2086 TD
262	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDUL AZIZ MUZARAB	DG 1211 T
263	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RISNO	DG 3961 TB
264	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YARNI SURYANA TEA	DG 3962 TB
265	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRIYANI	DG 3967 TB
266	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMIT HI.MA'BUD	DG 3974 TB
267	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WAGIYAH	DG 2031 TD
268	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHTAR HAJI MUHAMAD	DG 2047 TD
269	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARWAN HASAN	DG 3712 TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YELFIANA SUSU	DG 3775 TB
271	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARSELUS MOI LEUWAYAN	DG 3931 TB
272	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMAIL DJURUBASA	DG 3717 TB
273	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADRI POUI	DG 3872 TB
274	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HERUN PURNAMI	DG 3934 TB
275	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARDI MAULANA	DG 3754 TB
276	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KENG KAMARIBA	DG 2103 TD
277	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	REYNOLD ANDRE TUMALANG	DG 2104 TD
278	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DARLISA HI.ALI	DG 2093 TD
279	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RUBIYATI	DG 2094 TD
280	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUGENG	DG 3868 TB
281	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ANDI YANI	DG 3713 TB
282	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YOFENUS M. BUDIMAN	DG 2059 TD
283	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MAJID DJINA	DG 2126 TD
284	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISBAT HAMJAH	DG 2073 TD
285	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	HENGKI KAOI	DG 3941 TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
286	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI RAHAYU	DG 2108 TD
287	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET	DG 2110 TD
289	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WANDONO	DG 2113 TD
290	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUSTINA MUJIB	DG 2117 TD
291	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUPARMIWATI	DG 2120 TD
292	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MESERI	DG 2124 TD
293	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADE SALMAN,SKM.M,KES	DG 3774 TB
294	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KARTINI	DG 3867 TB
295	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PARWATI	DG 2080 TD
296	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WASIS AMANTO	DG 2083 TD
297	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RETNO	DG 2085 TD
298	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUKARDI SONINGA	DG 2123 TD
299	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SEFETUNA MOTJOR	DG 3776 TB
300	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WENAS SALASA	DG 3871 TB
301	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YAPET MANGENGEDE BARAHAMA	DG 3707 TB
302	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah	RISTINA STIORINI	DG 3870 TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		
303	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NONCE DIAS	DG 3694 TB
304	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FITRIANI HUSIN	DG 2144 TD
305	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LA ODE MAZRIN	DG 2190 TD
306	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HASIM LA ABU	DG 2150 TD
307	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YANCE ANO	DG 2148 TD
308	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MELKIANUS NABI	DG 2149 TD
309	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DESA TANURE	DG 2007 TP
310	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAIKAL SYUKUR	DG 2084 TD
311	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SENI SURYANI	DG 2116 TD
312	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WIDOYONO	DG 2207TD
313	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAKARTIKA	DG 2107 TD
314	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	EDY HARTONO	DG 2114 TD
315	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARIFATU HASANA	DG 2118 TD
316	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	THOYIBAH	DG 2119 TD
317	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IRWANTO KAHAR	DG 2154 TD
318	1 (satu) lembar	Surat Ketetapan	AGUS SUYATNO	DG 2115

Halaman 23 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		TD
319	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADI SUNARTO	DG 2079 TD
320	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MAHRONI	DG 2125 TD
321	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUAIB H. TAMSIL	DG 2082 TD
322	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASEHAT	DG 2139 TD
323	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDUL KADER SALASA	DG 2122 TD
324	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MIAN	DG 3968 TB
325	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YERMIAS Y LAUMBUR	DG 2011 TD
326	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD FAHROZI	DG 2015 TD
327	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FAIDIN MUHAMAD	DG 2016 TD
328	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HIRWAN A. RAHMAN	DG 2013 TD
329	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET MULYANTO	DG 2034 TC
330	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURDIN HADI	DG 1409 T
331	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SOLATUN	DG 2201 TD
332	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WILIAM LEMONTJINA	DG 3970 TB
333	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASIRUN	DG 3972 TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WIDODO	DG 2196 TD
335	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	TONY HARTONO	DG 6331 T
336	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHAMAD CHIRUL ANWAR	DG 8099TU
337	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YUDI SETIAWAN EFENDI	DG1801 TU
338	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WANISA UAT	DG 1297 T
339	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD BARMAWI	DG 5131 T
340	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUPRIADI UMAR	DG 5380 T
341	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UGENG SETIONO	DG 8417 T
342	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	JOKO WAHAB	DG 8103 TU
343	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADNAN HASANUDIN, ST	DG 1402 T
344	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUSANA	DG 8001 UT
345	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PONIMIN, SPD	DG 1403 T
346	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTIYAH	DG 8187 T
347	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	H. SITI MAWANI	DG 1407 T
348	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI ASTINI	DG 8002 UT
349	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	HJ. SITI MAWANI	DG 8506 T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
350	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LASANE LAHAJI	DG 8506 T
351	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAMLY MARASABESSY	DG 1006 UT
352	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTRISMAN	DG 8510 T
353	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAHRAN UAT	DG 2206 T
354	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YANTO SUNARYO	DG 2937 TB
355	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN	DG 2203
356	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SYUKUR WASHAB	DG 5706 T
357	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHAMAD ANSAR	DG 2779TB
358	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SABINGATUN	DG 2516 T
359	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURIYONO	DG 6207 7
360	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURNOMO	DG 5488 T
361	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUS SALIM	DG 5334 T
362	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WAHYU NINGSIA BAHARDIN	DG 2760 TA
363	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	QOBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
364	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	QUBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
365	1 (satu) lembar	Surat Ketetapan	KASTAM	DG 2331



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		TB
366	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MISITUN	DG 8102 T
367	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MANOPO ABD KADIR	DG 1210 T
368	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PEMERINTAH KAB. HALTIM	DG 134 HT
369	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UDIN ALI	DG 5075 T
370	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	VERA TANDEAN	DG 6018 T
371	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HENDRI PAIDUN	DG 2414 TB
372	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 160 HT
373	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 157 HT
374	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5280 HT
375	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5283 HT
376	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5281 HT
377	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5278 HT
378	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUKIR	DG 2966 TA
379	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah	SAMIADI	DG 8052 T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		
380	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IKRAM SYAFI	DG 5428 T
381	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHTAR TOMAIDI, SE	DG 8509 T
382	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAMID SABAN	DG 5390 T
383	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	GAZALI M TAHIR	DG 25II TB
384	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARNI AMINUDIN	DG 2762 TA
385	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARSINO	DG 2906 TA
386	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AAN RIYADI. S.SOS	DG 2722 TB
387	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SALMA YUSUF	DG 2530 TA
388	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NAHROWI	DG 8005 UT
389	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WADUD KIPU	DG 2074 TD
390	Asli 1 (satu) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Januari 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
391	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan April 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
392	Copy 1 (satu) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Mei 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
393	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Juni 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
394	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Juli 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
395	Copy 1 (satu) lembar STNKB No Seri 00603974 dan copy 1 (satu) lembar			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bukti pembayaran pajak sementara atas nama RAHEL DESI RESIMARAN dengan No.Pol. DG 8024 UT dengan jumlah sebesar Rp. 31.958.000,-
396	Copy 1 (satu) lembar STNKB No Seri 12816460 dan copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sementara atas nama ABDUL RAHIM ASRI dengan No.Pol. DG 8011 UT dengan jumlah sebesar Rp. 18.931.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH**;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan memberikan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar pula Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum atas nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-02/Q.2.5/Ft.1/11/2020 tanggal 14 Nopember 2020, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH** selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur bersama-sama dengan saksi ISMIWATY KODA (*tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitzing*) sebagai Bendahara Penerima uang hasil penerimaan atas pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Halmahera Timur, pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **TELAH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, SECARA MELAWAN HUKUM** yang dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Tidak menyetorkan ke kas daerah atas penerimaan uang pajak kendaraan bermotor bulan Februari s/d Mei 2018, dari sebanyak 17 (tujuh belas) Surat Ketetapan Pajak Kendaraan bermotor yang telah diterbitkan.
2. Melakukan penetapan pajak tidak sesuai ketentuan dengan cara :
 - a. Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 notice pajak atas Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 (kendaraan Baru) serta mengalihkan Nilai yang sudah di kurangi ke biaya Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 (mutasi);
 - b. Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 notice pajak atas Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 (kendaraan Baru) merubah seolah kendaraan lama atau menjadi biaya perpanjangan pajak kendaraan bermotor lama;
 - c. Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 notice pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor Mutasi;
 - d. Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 notice pajak atas Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 (mutasi) dan mengurangi nilai Pajak Kendaraan Bermotor pada kendaraan yang dimutasikan;
 - e. Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 notice pajak atas biaya Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan Pendaftaran Ulang.
3. Tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor dari dealer atas kendaraan bermotor baru roda 4 dan kendaraan roda 2.

Perbuatan terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAHA Bin DEDE NUCH bersama dengan saksi ISMIWATI KODA telah bertentangan dengan :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 122 ayat (4), Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- b) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;
- d) Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Samsat Se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Maluku Utara.

Bahwa terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAHA Bin DEDE NUCH secara melawan hukum sebagaimana di uraikan tersebut diatas telah **MEMPERKAYA DIRI SENDIRI** atau **ORANG LAIN** yaitu saksi ISMIWATY KODA dengan mendapatkan pengasilan yang tidak sah dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian penerimaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara dari hasil pajak kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp. 632.930.067,- (enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), atas perbuatan yang dilakukannya, dengan cara dan rincian sebagai berikut :

1. Tidak menyetorkan ke kas daerah atas penerimaan uang pajak kendaraan bermotor periode bulan Februari 2018 s/d Mei 2018, dari 17 (tujuh belas) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor yang telah di terbitkan seluruhnya sebesar Rp. 186.717,509,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
2. Melakukan penetapan pajak tidak sesuai ketentuan, dengan hasil uang yang diperoleh seluruhnya sebesar Rp. 342.404.928,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan cara dan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada notice lembar ke 4 (arsip Samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 (kendaraan baru) dan mengalihkan Nilai yang sudah dikurangi ke biaya BBN-KB 2 dari 1 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 2.418.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. Pada notice lembar ke 4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 dari 108 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 187.378.925,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan mengurangi nilai biaya PKB untuk kendaraan mutasi dari 9 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp.

Halaman 31 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



7.559.850,- (tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- d. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan Biaya BBN-KB 2 dan mengurangi nilai PKB pada kendaraan yang dimutasikan dari 23 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 34.774.560,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - e. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara mengurangi nilai PKB terhadap kendaraan Pendaftaran Ulang dari 36 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 29.059.968,- (dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
3. Tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor dari dealer atas kendaraan baru roda empat dan kendaraan roda 2, daris 4 notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 103.807.630,- (seratus tiga juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan cara dan rincian sebagaiberikut :
- a. Melakukan pengurangan nilai BBN-KB 1 dari kendaraan baru menjadi kendaraan mutasi (BBN-KB 2), dan tidak melaporkan sebagai pendapatan daerah, dari 4 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 49.688.430,- (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Menerima uang pengurusan kendaraan baru dari delaer akan tetapi tidak ditemukan notice pajak dan belum dilaporkan sebagai pendapatan keuangan daerah dari 3 data notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 54.119.200,- (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Bahwa untuk menghilangkan, merubah dan mengurangi nilai biaya yang tercantum pada lembar ke-4 dan lembar ke-2 dalam Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor, terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur bersama-sama denga saksi ISMIWATY KODA, pada kurun waktu tahun 2018 seringkali memerintahkan saksi HARYANTO yang bekerja sebagai pegawai Honorer pada kantor UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur dengan tugas sehari-hari sebagai pembantu bendahara penerima untuk melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ secara terpisah antara Lembar 1, 3 dan 5 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar 2 dan 4, sekaligus dengan catatan angka biaya yang berbeda antara lembar 1, 3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4.

Adapun mekanisme rangkapan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ terdiri dari 5 (lima) rangkap untuk 1 (satu) kendaraan bermotor yaitu :

- Lembar 1 untuk wajib pajak warna coklat;
- Lembar 2 untuk BPKPAD warna biru;
- Lembar 3 untuk Jasa Rahardja warna hijau;
- Lembar 4 untuk arsip Kantor Samsat warna merah;
- Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.

Bahwa setiap hari atas penerimaan keuangan dari pajak kendaraan bermotor yang di terima oleh UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur, pada biaya yang tercantum sebagaimana dalam lembar ke-2 (arsip Samsat) dan lembar ke-4 (arsip BPKPAD) wajib di setorkan oleh saksi ISMIWATY KODA selaku Bendahara Penerima ke rekening kas daerah Provinsi Maluku Utara, maka dengan dibuatnya perbedaan angka atas biaya PKB dan BBN-KB juga dengan dihilangkannya biaya BBN-KB1 (kendaraan baru) menjadi kendaraan lama antara lembar ke-1, 3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4, terdapat selisih nilai uang pajak, yang dari hasil selisih uang tersebut dinikmati oleh terdakwa bersama dengan saksi ISWIWATY KODA sebagai penghasilan yang tidak sah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH bersama-sama dengan saksi ISMIWATY KODA telah **MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH** Provinsi Maluku Utara seluruhnya sebesar **Rp. 632.930.067,- (enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah)**, sebagaimana hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang di tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/219.1-Insp.P/MU/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada UPTB Samsat Halmahera Timur Tahun 2018 terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara, dengan rincian sebagai berikut :

	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)	Pengembalian
1.	Terdapat Penerimaan Pajak Tidak disetor ke Kas Daerah	186.717.509,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Terdapat Penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan modus operandi sebagai berikut :		
a)	Pendaftaran Kendaraan Baru ke Mutasi (Modifikasi) menghilangkan BBn-KB 1 dan mengalihkan Nilai yang sudah dikurangi ke BBn-KB 2	2.418.000,00	
b)	Pendaftaran Kendaraan Baru di alihkan ke Pendaftaran Ulang (Penul) : menghilangkan nilai BBn-KB 1	187,378,925,00	
c)	Mengurangi nilai PKB untuk Kendaraan Mutasi	7,559,850,00	
d)	Menghilangkan BBn-KB2 dan mengurangi nilai PKB pada Kendaraan yang dimutasi	34,774,560,00	
e)	Mengurangi Nilai PKB terhadap Kendaraan Pendaftaran Ulang (Penul)	29.059.968,00	
f)	Menyetor Pendapatan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak	81.213.625,00-	
3.	Terdapat Pendapatan dari Dealer atas Kendaraan Baru Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua tidak dilaporkan sebagai Pendapatan dengan modus operandi sbb :		
a)	melakukan pengurangan nilai BBn-KB 1 yang dikenakan untuk Kendaraan Baru dengan Modus Operandi dialihkan menjadi Kendaraan Mutasi sehingga nilai BBn-KB 1 dikurangi dan dialihkan menjadi BBn-KB2 untuk pengurusan Kendaraan Mutasi	49,688,430,00	
	pengurusan dari Dealer atas Kendaraan Baru yang tidak ditemukan Notice Pajak	54,119,200,00	
Total Kerugian		Rp. 632.930.067,	Rp.0,-

Perbuatan Terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH** selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur yang diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/ADM-MU/57/2017 tanggal 9 Agustus 2017, bersama-sama dengan saksi ISMIWATY KODA (*tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitzing*) sebagai Bendahara Penerima uang hasil penerimaan atas pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Halmahera Timur, pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **TELAH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

1. Tidak menyetorkan ke kas daerah atas penerimaan uang pajak kendaraan bermotor periode bulan Februari 2018 s/d Mei 2018, dari 17 (tujuh belas) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor yang telah di terbitkan seluruhnya sebesar Rp. 186.717,509,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan rupiah).
2. Melakukan penetapan pajak tidak sesuai ketentuan, dengan hasil uang yang diperoleh seluruhnya sebesar Rp. 342.404.928,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan cara dan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada notice lembar ke 4 (arsip Samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 (kendaraan baru) dan mengalihkan Nilai yang sudah di kurangi ke biaya BBN-KB 2 dari 1 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 2.418.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. Pada notice lembar ke 4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 dari 108 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 187.378.925,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan mengurangi nilai biaya PKB untuk kendaraan mutasi dari 9 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 7.559.850,- (tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



- d. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan Biaya BBN-KB 2 dan mengurangi nilai PKB pada kendaraan yang dimutasikan dari 23 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 34.774.560,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - e. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara mengurangi nilai PKB terhadap kendaraan Pendaftaran Ulang dari 36 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 29.059.968,- (dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
3. Tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor dari dealer atas kendaraan baru roda empat dan kendaraan roda 2, dari 4 notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 103.807.630,- (seratus tiga juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan cara dan rincian sebagaiberikut :
- a Melakukan pengurangan nilai BBN-KB 1 dari kendaraan baru menjadi kendaraan mutasi (BBN-KB 2), dan tidak melaporkan sebagai pendapatan daerah, dari 4 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 49.688.430,- (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Menerima uang pengurusan kendaraan baru dari dealer akan tetapi tidak ditemukan notice pajak dan belum dilaporkan sebagai pendapatan keuangan daerah dari 3 data notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 54.119.200,- (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

Bahwa terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SHAJ Bin DEDE NUCH selaku kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/ADM-MU/57/2017 tanggal 9 Agustus 2017 mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Samsat Se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Maluku Utara untuk memimpin, menyusun kebijakan mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN** dengan cara menghilangkan, merubah dan mengurangi nilai biaya yang tercantum pada lembar ke-4 dan lembar ke-2 dalam Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor, terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur bersama-sama dengan saksi ISMIWATY KODA, pada kurun waktu tahun 2018 seringkali dengan kewenangannya tersebut memerintahkan saksi HARYANTO yang bekerja sebagai pegawai Honorer pada kantor UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur dengan tugas sehari-hari sebagai pembantu bendahara penerima untuk melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ secara terpisah antara Lembar 1,3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4, sekaligus dengan catatan angka biaya yang berbeda antara lembar-1,3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4.

Adapun mekanisme rangkapan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ terdiri dari 5 (lima) rangkap untuk 1 (satu) kendaraan bermotor yaitu :

- Lembar 1 untuk wajib pajak warna coklat;
- Lembar 2 untuk BPKPAD warna biru;
- Lembar 3 untuk Jasa Rahardja warna hijau;
- Lembar 4 untuk arsip Kantor Samsat warna merah;
- Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.

Bahwa setiap hari atas penerimaan keuangan dari pajak kendaraan bermotor yang di terima oleh UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur, pada biaya yang tercantum sebagaimana dalam lembar ke-2 (arsip Samsat) dan lembar ke-4 (arsip BPKPAD) wajib di setorkan oleh saksi ISMIWATY KODA selaku Bendahara Penerima ke rekening kas daerah Provinsi Maluku Utara, maka dengan dibuatnya perbedaan angka atas biaya PKB dan BBN-KB juga dengan dihilangkannya biaya BBN-KB1 (kendaraan baru) menjadi kendaraan lama antara lembar ke-1,3 dan 5 dengan lembar 2 dan 4, terdapat selisih nilai uang pajak, yang dari selisih uang tersebut terdakwa bersama dengan saksi ISWIWATY KODA mendapatkan keuntungan atau menguntungkan dirinya sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH bersama-sama dengan saksi ISMIWATY KODA telah **MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA /DAERAH** Provinsi Maluku Utara seluruhnya sebesar **Rp. 632.930.067,- (enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah)**, sebagaimana hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/219.1-Insp.P/MU/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada UPTB Samsat Halmahera Timur Tahun 2018 terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Kerugian (Rp)	Pengembalian
1. Terdapat Penerimaan Pajak Tidak disetor ke Kas Daerah	186.717.509,00	
2. Terdapat Penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan modus operandi sebagai berikut :		
g) Pendaftaran Kendaraan Baru ke Mutasi (Modifikasi) menghilangkan BBn-KB 1 dan mengalihkan Nilai yang sudah dikurangi ke BBn-KB 2	2.418.000,00	
h) Pendaftaran Kendaraan Baru di alihkan ke Pendaftaran Ulang (Penul) : menghilangkan nilai BBn-KB 1	187,378,925,00	
i) Mengurangi nilai PKB untuk Kendaraan Mutasi	7,559,850,00	
j) Menghilangkan BBn-KB2 dan mengurangi nilai PKB pada Kendaraan yang dimutasi	34,774,560,00	
k) Mengurangi Nilai PKB terhadap Kendaraan Pendaftaran Ulang (Penul)	29.059.968,00	
l) Menyetor Pendapatan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak	81.213.625,00-	
3. Terdapat Pendapatan dari Dealer atas Kendaraan Baru Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua tidak dilaporkan sebagai Pendapatan dengan modus operandi sbb :		
b) melakukan pengurangan nilai BBn-KB 1 yang dikenakan untuk Kendaraan Baru dengan Modus Operandi dialihkan menjadi Kendaraan Mutasi sehingga nilai BBn-KB 1 dikurangi dan dialihkan menjadi BBn-KB2 untuk pengurusan Kendaraan Mutasi	49,688,430,00	
pengurusan dari Dealer atas Kendaraan Baru yang tidak ditemukan Notice Pajak	54,119,200,00	
Total Kerugian	Rp. 632.930.067,	Rp.0,-



Perbuatan Terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi, selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BASORI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyelewengan uang pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa saksi tahu penyelewengan uang penerimaan pajak di kantor Samsat, karena dipanggil di Kejaksaan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa tugas saksi di Samsat Kabupaten Halmahera Timur selaku Kepala seksi Penetapan yaitu Membuat Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru maupun perpanjangan;
- Bahwa yang menjadi acuan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 12 tahun 2018 tentang penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, karena saksi tidak difungsikan oleh Kepala Samsat Halmahera Timur yang dijabat Terdakwa Zulwahyu dan tugas saksi diserahkan kepada Pegawai honor yaitu sdr.Haryanto dan sdri Samsia;
- Bahwa Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor untuk unit kendaraan baru berawal dari Pendaftaran menerima berkas kendaraan dari Pak Konoras (Baur STNK/Anggota Polisi) untuk diisi data kendaraan, selanjutnya diserahkan ke bagian Penetapan untuk mengecek dan menetapkan pajak kendaraan, setelah itu bagian Penetapan mengeluarkan kode bayar dan serahkan kepada kaur STNK, untuk dikeluarkan pembayaran ke Bank yang ditunjuk, jika kendaraan baru maka wajib pajak sudah menitipkan uang pajak kendaraan baru, setelah dibayar dan pihak Bank mengeluarkan bukti lunas diserahkan kepada Bandahara penerima untuk penerbitan nota pajak sedangkan untuk proses penetapan pajak Kendaraan untuk kendaraan pendaftaran ulang hanya bedanya yaitu untuk pendaftaran ulang didaftarkan dan dibayarkan langsung oleh wajib pajak;
- Bahwa setahu saksi pembayaran pajak kendaraan seharusnya di Bank yang ditunjuk namun yang terjadi pembayaran melalui bendahara penerima;
- Bahwa yang berwenang menetapkan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Halmahera Timur adalah saksi selaku Kepala saksi Penetapan namun karena saksi tidak difungsikan oleh Kepala Samsat Halmahera Timur sehingga Penetapan pajak kendaraan bermotor tahun 2018 diserahkan oleh Kepala Samsat kepada pegawai honor;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penetapan pajak tidak sesuai dengan aturan yaitu dilakukan dengan cara :
 1. Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 1 (kendaraan baru) dan mengalihkan nilai yang sudah dikurangi dengan biaya balik nama kendaraan bermotor 2 (mutasi);
 2. Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 1 (kendaraan baru) merubah seolah kendaraan lama atau menjadi biaya perpanjangan pajak kendaraan bermotor;

Halaman 40 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



3. Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas pajak kendaraan bermotor mutasi;
 4. Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 2 (mutasi) dan mengurangi nilai pajak kendaraan bermotor pada kendaraan yang mutasi;
 5. Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan pendaftaran ulang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala saksi Penetapan Kantor Samsat Halmahera Timur saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi secara maksimal karena tugas saksi diambil alih oleh Terdakwa dan diserahkan kepada pegawai honor;
 - Bahwa surat ketetapan ada 5 rangkap sebagai berikut :
 1. Lembar 1 untuk wajib pajak warna coklat;
 2. Lembar 2 untuk BPKPAD warna biru;
 3. Lembar 3 untuk Jasa Rahardja warna hijau;
 4. Lembar 4 untuk arsip Kantor Samsat warna merah;
 5. Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.
 - Bahwa setahu saksi lembaran setoran pajak lembaran satu dengan lembaran yang lain ditulis isinya beda-beda sedangkan wajib pajak dan kendaraan yang sama itu terjadi karena dicetak secara manual sehingga hasilnya lembaran yang diarsip nilai rendah dan lembaran yang disetorkan ke wajib pajak dan Dispenda nilainya besar;
 - Bahwa BBn-KB 1 yaitu kendaraan baru dan BBn-KB 2 yaitu kendaraan lama atau kendaraan yang dibalik nama;
 - Bahwa saksi tidak difungsikan oleh Terdakwa sehingga saksi tidak tahu arsip setoran pajak saksi yang arsipkan di arsip kantor dan yang diberikan ke Wajib Pajak maupun yang ke Dispenda;
 - Bahwa sekarang saksi masih menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan pada Kantor Samsat Halmahera Timur;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pajak kendaraan bermotor sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018;
 - Bahwa penetapan yang ada pada Terdakwa yang buat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengeluarkan Penetapan;
- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor saksi tidak masuk kerja karena saksi tidak difungsikan dan tugas saksi dilimpahkan oleh Terdakwa kepada Haryanto (pegawai honor);
- Bahwa isi dari penetapan yaitu mengenai rincian besarnya pajak yang akan dibayar;
- Apakah saksi melihat Bendahara menyetor uang kepada Terdakwa ?
- Bahwa saksi tidak melihat Bendahara menyetor uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penyetoran tidak mendapat uang insentif dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar bila Terdakwa tidak diaktifkan masuk kantor.

2. Saksi HUSEN ABAS :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyelewengan uang pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi tahu penyelewengan uang penerimaan pajak karena dipanggil di Kejaksaan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Apa yang menjadi tugas saksi di Kantor Samsat Halmahera Timur ?
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara pengeluaran pada Kantor Samsat Halmahera Timur antara lain:
 - Mengajukan permohonan permintaan anggaran rutin, untuk kegiatan di UPTB Kantor Samsat Halmahera Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima kucuran anggaran rutin untuk bagian Kantor Samsat Halmahera Timur ;
- Menata usahakan penggunaan anggaran sesuai kegiatan Kantor Samsat Halmahera Timur yang ditetapkan;
- Membayar uang anggaran sesuai kegiatan Kantor Samsat;
- Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin kegiatan samsat;
- Bahwa saksi selaku Bendahara pengeluaran pada Kantor Samsat Halmahera Timur tahun 2018 tidak pernah menerima penyetoran pajak ke Kas daerah dari penerimaan pajak kendaraan bermotor karena untuk penerimaan uang hasil pajak kendaraan bermotor;
- Bahwa penggunaan dana rutin adalah :
 - Kegiatan operasional Samsat keliling;
 - Biaya perjalanan dinas;
 - Pembelian alat tulis Kantor;
- Bahwa setahu saksi pendaftaran dan pengurusan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak hanya datang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- Bahwa yang melakukan penyetoran uang pajak daerah atas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sdr Hariyanto selaku operator (Pegawai honor) oleh karena pada tahun 2018 pejabat jarang masuk Kantor sehingga yang melaksanakan tugas pegawai honorer;
- Bahwa setahu saksi pembayaran pajak kendaraan pajak kendaraan tidak melalui bendahara penerima tetapi oleh para wajib pajak dilakukan di Bank yang ditunjuk yaitu Bank Maluku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Zulwahyu A Usman Syah dan saksi Ismiwati Koda menerima uang pembayaran pajak langsung dari pihak dealer kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Zulwahyu dan Ismiwati menghilangkan nilai BBN-KB dari kendaraan baru yang pembayaran pajaknya diurus oleh pihak dealer kendaraan bermotor yang seharusnya dicantumkan dalam lembar 2 dan 4 dari ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI;

Halaman 43 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bila ada bukti pembayaran ada yang hilang;
- Bahwa untuk pembayaran pajak tidak melalui bagian penetapan karena mereka buat sendiri;
- Bahwa setahu saksi lembaran setoran pajak lembaran satu dengan lembaran yang lain ditulis isinya beda-beda sedangkan wajib pajak dan kendaraan yang sama itu terjadi karena dicetak secara manual sehingga hasilnya lembaran yang diarsip nilai rendah dan lembaran yang disetorkan ke wajib pajak dan Dispenda nilainya besar;
- Bahwa BBn-KB 1 yaitu kendaraan baru dan BBn-KB 2 yaitu kendaraan lama atau kendaraan yang dibalik nama;
- Bahwa saksi tidak difungsikan oleh Terdakwa sehingga saksi tidak tahu arsip setoran pajak saksi yang arsipkan di arsip kantor dan yang diberikan ke Wajib Pajak maupun yang ke Dispenda;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pajak kendaraan bermotor sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian keuangan negara sekitar 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penetapan pajak tidak sesuai aturan yaitu :
 - Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 1 (kendaraan baru) dan mengalihkan nilai yang sudah dikurangi dengan biaya balik nama kendaraan bermotor 2 (mutasi);
 - Bahwa menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 1 (kendaraan baru) merubah seolah kendaraan lama atau menjadi biaya perpanjangan pajak kendaraan bermotor;
 - Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas pajak kendaraan bermotor mutasi;
 - Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 2 (mutasi) dan

Halaman 44 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi nilai pajak kendaraan bermotor pada kendaraan yang mutasi;

- Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan pendaftaran ulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Zulwahyu A Usman Syah dan saksi Ismiwati Koda menerima uang pembayaran pajak langsung dari pihak dealer kendaraan bermotor;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar bila Terdakwa tidak aktifkan saksi masuk kantor.

3. Saksi YUSRI, SE. :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyelewengan uang pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi tahu ada penyelewengan uang penerimaan pajak di kantor samsat, karena saksi dipanggil di Kejaksaan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa menjadi tugas saksi di kantor samsat yaitu melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata laksana kearsipan dan tata laksana persuratan namun tugas tersebut saksi tidak laksanakan karena diambil oleh Terdakwa selaku Kepala kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan laporan bulanan penerimaan pajak;

Halaman 45 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menetapkan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Halmahera Timur adalah sdr Basori;-
- Bahwa pendaftaran dan pengurusan pajak kendaraan bermotor setahu saksi wajib pajak hanya datang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- Bahwa yang melakukan penyetoran uang pajak daerah atas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sdr Hariyanto selaku operator (Pegawai honor) oleh karena pada tahun 2018 pejabat jarang masuk Kantor sehingga yang melaksanakan tugas pegawai honorer;
- Bahwa setahu saksi pembayaran pajak kendaraan pajak kendaraan tidak melalui bendahara penerima tetapi oleh para wajib pajak dilakukan di Bank yang ditunjuk yaitu Bank Maluku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Zulwahyu A Usman Syah dan saksi Ismiwati Koda menerima uang pembayaran pajak langsung dari pihak dealer kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Zulwahyu dan Ismiwati menghilangkan nilai BBN-KB dari kendaraan baru yang pembayaran pajaknya diurus oleh pihak dealer kendaraan bermotor yang seharusnya dicantumkan dalam lembar 2 dan 4 dari ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI;
- Bahwa saksi tidak tahu bila ada bukti pembayaran ada yang hilang;
- Bahwa setahu saksi lembaran setoran pajak lembaran satu dengan lembaran yang lain ditulis isinya beda-beda sedangkan wajib pajak dan kendaraan yang sama itu terjadi karena dicetak secara manual sehingga hasilnya lembaran yang diarsip nilai rendah dan lembaran yang disetorkan ke wajib pajak dan Dispenda nilainya besar;
- Bahwa BBN-KB 1 yaitu kendaraan baru dan BBN-KB 2 yaitu kendaraan lama atau kendaraan yang dibalik nama;
- Bahwa saksi tidak difungsikan oleh Terdakwa sehingga saksi tidak tahu arsip setoran pajak saksi yang arsipkan di arsip kantor dan yang diberikan ke Wajib Pajak maupun yang ke Dispenda;

Halaman 46 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pajak kendaraan bermotor sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penetapan pajak tidak sesuai aturan yaitu :
 - Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 1 (kendaraan baru) dan mengalihkan nilai yang sudah dikurangi dengan biaya balik nama kendaraan bermotor 2 (mutasi);
 - Bahwa menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 1 (kendaraan baru) merubah seolah kendaraan lama atau menjadi biaya perpanjangan pajak kendaraan bermotor;
 - Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas pajak kendaraan bermotor mutasi;
 - Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 2 (mutasi) dan mengurangi nilai pajak kendaraan bermotor pada kendaraan yang mutasi;
 - Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan pendaftaran ulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian keuangan negara sekitar 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Zulwahyu A Usman Syah dan saksi Ismiwati Koda menerima uang pembayaran pajak langsung dari pihak dealer kendaraan bermotor;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi FAIZAL R MUHAMMAD :

Halaman 47 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyelewengan uang pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi tahu penyelewengan uang penerimaan pajak karena dipanggil di Kejaksaan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa menjadi tugas saksi di Kantor Samsat yaitu sebagai Kepala seksi penagihan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan laporan bulanan penerimaan pajak;
- Bahwa pada tahun 2018 sistim perpanjangan, pendaftaran baru dan status kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Halmahera Timur, masih sistim manual yaitu wajib pajak langsung datang ke loket pendaftaran dengan membawa surat penetapan pajak yang sama setelah dihitung berdasarkan surat pajak yang lama kemudian wajib pajak membayar diloket dan uang pembayaran diterima oleh bendahara penerima, kemudian surat ketetapan pajak dicetak oleh bendahara penerima yang dibantu oleh sdr Haryanto (pegawai honorer) pembantu bendahara penerima;
- Bahwa selama saksi menjabat kepala seksi penagihan saksi tidak pernah diberikan uang apapun oleh Terdakwa Zulwahyu A Usman Sjah selaku Kepala Samsat Halmahera Timur;
- Bahwa yang melakukan penyetoran uang pajak daerah atas penerimaan pajak kendaraan bermotor siapa saja bergantian antara lain adalah sdr Hariyanto selaku operator (Pegawai honor) yang sehari-hari membantu bendahara penerima yaitu Ismiwati Koda;
- Bahwa yang berwenang menetapkan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Halmahera Timur adalah sdr Basori;-
- Bahwa setahu saksi wajib pajak hanya datang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan bermotor;

Halaman 48 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyetoran uang pajak daerah atas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sdr Hariyanto selaku operator (Pegawai honor) oleh karena pada tahun 2018 pejabat jarang masuk Kantor sehingga yang melaksanakan tugas pegawai honorer;
- Bahwa saksi tidak tahu bila ada bukti pembayaran ada yang hilang;
- Bahwa pembayaran tidak melalui saksi tetapi langsung ke bandahara penerima yaitu saksi Ismiwati Koda;
- Bahwa proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, awalnya wajib pajak datang menghadap Kasi Penetapan setelah itu Kasi penetapan menentukan besaran pajak dan ke Bandahara membayar;
- Bahwa setahu saksi lembaran setoran pajak lembaran satu dengan lembaran yang lain ditulis isinya beda-beda sedangkan wajib pajak dan kendaraan yang sama itu terjadi karena dicetak secara manual sehingga hasilnya lembaran yang diarsip nilai rendah dan lembaran yang disetorkan ke wajib pajak dan Dispenda nilainya besar;
- Bahwa BBn-KB 1 yaitu kendaraan baru dan BBn-KB 2 yaitu kendaraan lama atau kendaraan yang dibalik nama;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pajak kendaraan bermotor sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian keuangan negara sekitar 7.00.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penetapan pajak tidak sesuai aturanyaitu :
 - Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 1 (kendaraan baru) dan mengalihkan nilai yang sudah dikurangi dengan biaya balik nama kendaraan bermotor 2 (mutasi);
 - Bahwa menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 1 (kendaraan baru) merubah seolah kendaraan lama atau menjadi biaya perpanjangan pajak kendaraan bermotor;

Halaman 49 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas pajak kendaraan bermotor mutasi;
- Menghilangkan nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya balik nama kendaraan bermotor 2 (mutasi) dan mengurangi nilai pajak kendaraan bermotor pada kendaraan yang mutasi;
- Mengurangi nilai biaya pada lembar ke 4 nota pajak atas biaya pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan pendaftaran ulang;
- Bahwa yang para Terdakwa lakukan adalah manipulasi data tentang besar kecilnya pajak dari kendaraan baru menjadi kendaraan tua ;
- Bahwa secara normal dalam pencetakan notes pajak dapat dirobah oleh yang membuat;
- Bahwa notes tidak dapat disimpan oleh orang lain hanya bendahara;
- Bahwa selama saksi bertugas di UPTB Samsat Halmahera Timur jarang masuk Kantor karena tidak pernah ditugaskan jadi kesehariannya yang melaksanakan pekerjaan pegawai honorer atas perintah langsung Kepala samsat;
- Bahwa Blangko notes pajak dari Badan Samsak Propinsi yang berikan dan disimpan ruangan Bendahara;
- Bahwa notes pajak dapat di cetak 2 (dua) kali di kantor maupun diluar kantor oleh bendahara atau pegawai lain atas perintah para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi HALID AGIL :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyelewengan uang pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2018;

Halaman 50 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyelewengan uang penerimaan pajak di kantor samsat Haltim, karena dipanggil di Kejaksaan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa tugas saksi di kantor samsat sebagai pegawai honor sejak tahun 2015 dengan tugas saksi yaitu membantu dibagian penetapan dan mengantar surat-surat keluar ke Kantor lain;
- Bahwa saksi tidak diberi kewenangan untuk membuat penetapan;
- Bahwa setahu saksi penetapan pajak kendaraan baru yaitu bagian pendaftaran menerima berkas kendaraan dari Polisi yang dititipkan oleh Dealer untuk diisi kendaraan selanjutnya diserahkan kebagian penetapan untuk mengecek dan menetapkan pajak kendaraan dan setelah itu bagian penetapkan nilai pajak kendaraan dan mendapatkan validasi dari Polisi dan Jasa Raharja dan setelah itu berkas tersebut diserahkan ke bendahara dan selanjutnya bendahara mengeluarkan kode bayar dan untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang ditunjuk dan setelah melakukan pembayaran maka pihak Bank mengeluarkan bukti lunas maka bukti lunas tersebut diserahkan kepada Bendahara penerima untuk menerbit nota pajak sedangkan untuk proses penetapan pajak kendaraan pendaftaran ulang sama hanya bedanya yaitu untuk pendaftaran ulang didaftarkan dan dibayar langsung oleh wajib pajak;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penyetoran uang pajak daerah atas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sdr Hariyanto selaku operator (Pegawai honor) yang sehari-hari membantu bendahara penerima yaitu Ismiwati Koda;
- Bahwa dalam pendaftaran dan pengurusan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak hanya datang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- Bahwa yang berwenang menetapkan pajak kendaraan bermotor adalah sdr Bosori selaku Kepala seksi penetapan di Samsat selaku kepala seksi penetapan;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor namun karena saat itu masih menggunakan sistim manual sehingga saat

Halaman 51 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi langsung menyerahkan kepada bendahara penerima dan bendahara penerima yang melakukan pembayaran di Bank;

- Bahwa pembayaran tidak melalui saksi tetapi langsung ke bendahara penerima yaitu saksi Ismiwati Koda;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencantumkan bilai BBN-KB pada note pajak kendaraan baru atau mengurangi nilai BBN-KB pada note pajak kendaraan ulang tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pajak kendaraan bermotor sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian keuangan negara sekitar 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah manipulasi data tentang besar kecilnya pajak dari kendaraan baru menjadi kendaraan tua ;
- Bahwa secara normal dalam pencetakan notes pajak dapat dirobah oleh yang membuat;
- Bahwa notes tidak dapat disimpan oleh orang lain hanya bendahara;
- Bahwa selama saksi bertugas di UPTB Samsat Halmahera Timur jarang masuk Kantor karena tidak pernah ditugaskan jadi kesehariannya yang melaksanakan pekerjaan pegawai honorer atas perintah langsung Kepala samsat;
- Bahwa blangko notes pajak dari Badan Samsat Propinsi yang memberikan dan disimpan ruangan Bendahara;
- Bahwa notes pajak dapat di cetak 2 (dua) kali di kantor maupun diluar kantor oleh bendahara atau pegawai lain atas perintah para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi SYAHDAN DJAMIN :

Halaman 52 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyelewengan uang pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi tahu penyelewengan uang penerimaan pajak di kantor samsat, karena dipanggil di Kejaksaan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sebagai pegawai operator komputer yang memasukan dan mencatat angka pada lembaran blangko surat ketetapan pajak daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada standar operasional prosedur tentang pembayaran pajak kendaraan pada UPTB Samsat Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk memasukan dan mencetak angka pada lembaran blangko surat ketetapan pajak daerah ;
- Bahwa surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLL ada 5 rangkap sebagai berikut :
 - Lembar 1 untuk wajib pajak warna coklat;
 - Lembar 2 untuk BPKPAD warna biru;
 - Lembar 3 untuk Jasa Rahardja warna hijau;
 - Lembar 4 untuk arsip Kantor Samsat warna merah;
 - Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.
- Bahwa yang bertugas sebagai operator computer, selain saksi juga ada Hariyanto dan Ramli yang melakukan penyetoran uang pajak daerah atas penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sehari-hari membantu bendahara penerima yaitu Ismiwati Koda;
- Bahwa untuk pendaftaran dan pengurusan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak hanya datang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- Bahwa yang berwenang menetapkan pajak kendaraan bermotor adalah sdr Bosori selaku Kepala seksi penetapan di Samsat selaku kepala seksi penetapan;

Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor namun karena saat itu masih menggunakan sistim manual sehingga saat itu saksi langsung menyerahkan kepada bendahara penerima dan bendahara penerima yang melakukan pembayaran di Bank;
- Bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak melalui saksi tetapi langsung ke bendahara penerima yaitu saksi Ismiwati Koda;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencantumkan nilai BBN-KB pada notes pajak kendaraan baru atau mengurangi nilai BBN-KB pada note pajak kendaraan ulang tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pajak kendaraan bermotor sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa Ismiwati Koda selaku bendahara yang menyetor hasil penerimaan Daerah dari PKB dan BBN-KB ke rekening Kas Daerah Bank Maluku;
- Bahwa yang para Terdakwa lakukan adalah manipulasi data tentang besar kecilnya pajak dari kendaraan baru menjadi kendaraan tua ;
- Bahwa secara normal dalam pencetakan notes pajak dapat dirobah oleh yang membuat;
- Bahwa besaran nilai blangko pajak, yang menentukan adalah sesuai perintah bendahara;
- Bahwa notes tidak dapat disimpan oleh orang lain hanya bendahara;
- Bahwa notes pajak dapat di cetak 2 (dua) kali di kantor maupun diluar kantor oleh bendahara atau pegawai lain atas perintah para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi Hi. ABUBAKAR BARHAM :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Halaman 54 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyelewengan uang pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi tahu penyelewengan uang penerimaan pajak di kantor samsat karena dipanggil di Kejaksaan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa untuk pengurusan STNK dan pajak kendaraan drump truk dilakukan, setelah pelanggan membeli dump truk di dealer Hino Ternate kemudian kami meminta kepada Hino motor sales Indonesia di Jakarta untuk dikirimkan Faktur drump truk yang telah dibeli oleh pelanggan dan setelah kami mendapatkan Faktur kendaraan tersebut kemudian berkas kendaraan kami kirim ke Ditlantas Polda Maluku Utara untuk membuat BPKB dan penomoran STNK dan setelah terbit nomor Polisi dari Polda Maluku Utara lalu berkas saksi bawah langsung ke Samsat Halmahera Timur untuk diproses STNK dan pajak kendaraannya, kemudian Kantor Samsat Halmahera Timur saksi diberi perincian biaya yang mesti kami bayar untuk pajak kendaraan dan bea balik nama dari bagian penetapan kemudian saksi membayarkan biaya sesuai yang ditetapkan Terdakwa Ismiwati selaku Bendaharanya maka setelah STNK dan pembayaran pajak selesai dan Polisi yang mengantarkan STNK dan 1 lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI kepada kami di Ternate;
- Bahwa pada tahun 2018 ada 12 unit dump truk merk Hino dari PT Nengmey Pratama urus pembayaran pajak dan STNK melalui Terdakwa Ismiwati Koda di Kantor Samsat Halmahera Timur;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 pernah mengurus pembayaran pajak dan STNK dengan Nomor Polisi DG 8011 UT atas nama Abdul Rahim Asri Rp. 18.931.000 dan DG 8024 UT atas nama Rahel Desi Resimarang Rp.31.958.000 melalui Terdakwa Ismiwati Koda;
- Bahwa saksi tidak menerima lembar 1 dari Terdakwa Ismiwati Koda surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI dengan Nomor Polisi DG 8011 UT atas nama Abdul Rahim Asri dan DG 8024 UT atas nama Rahel Desi Resimarang namun diberi lembaran foto copy pajak sementara;

Halaman 55 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak diberikan lembaran asli karena blangko asli tidak ada;
- Bahwa saksi pernah menitipkan uang pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada Kepala Kantor Samsat Haltim yaitu Terdakwa Zulwahyu dan Bendahara Ismiwati Koda;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bosori dalam rangka untuk mendapat penetapan pajak kendaraan kemudian saksi ke Bandahara melakukan pembayaran;
- Bahwa proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, awalnya wajib pajak datang menghadap Kasi Penetapan setelah itu Kasi penetapan menentukan besaran pajak dan ke Banhadahara membayar;
- Bahwa saksi tidak tahu lembaran setoran pajak lembaran satu dengan lembaran yang lain beda-beda sedangkan wajib pajak dan kendaraan yang sama itu terjadi karena dicetak secara manual sehingga hasilnya lembaran yang diarsip nilai rendah dan lembaran yang disetorkan ke wajib pajak dan Dispenda nilainya besar;
- Bahwa yang para Terdakwa lakukan adalah manipulasi data tentang besar kecilnya pajak dari kendaraan baru menjadi kendaraan tua ;
- Bahwa secara normal dalam pencetakan notes pajak dapat dirobah oleh yang membuat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

8. Saksi INDRA BIAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyelewengan uang pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2018;

Halaman 56 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyelewengan uang penerimaan pajak di kantor samsat Haltim, karena dipanggil di Kejaksaan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa untuk pengurusan STNK dan pembayaran pajak bagi pembeli motor dilakukan setelah pelanggan membeli sepeda motor di CV Lion Cabang Halmahera Timur, kemudian dokumen penjualan dikirim ke dealer Ternate, kemudian CV Lion Ternate meminta kepada PT Daya Adicipta di Manado selaku main dealer sepeda motor Honda untuk dikirimkan faktur sepeda motor yang telah dibeli oleh pelanggan, setelah kami mendapat faktur dari kendaraan dari main dealer Manado kemudian berkas kendaraan kami kirim ke Ditlantas Polda Maluku Utara untuk membuat BPKB dan penomoran STNK, setelah diterbitkan nomor Polisi dari Polda Maluku Utara lalu berkas kami kirimkan ke Samsat Halmahera Timur untuk diproses STNK dan Pajak Kendaraan, untuk pembayaran pajak kendaraan sebelumnya kami setiap tahun telah mendapat table pembayaran PKB dan BBNKB dari Kantor Samsat Halmahera Timur berdasarkan tipe kendaraan, kubikasi mesin(CC) dan transmisi(AT/MT), berdasarkan table kami membuat rincian biaya yang dibayarkan kepada Kantor Samsat Halmahera Timur biasanya Terdakwa Ismiwati Koda selaku Bendahara yang menerima pembayaran tersebut, dan setelah pembayaran pajak telah selesai Polisi yang bertugas Samsat Haltim yang mengantar SNTK, lembar 1 surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI kepada kami di Dealer Ternate;
- Bahwa yang memberikan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari CV Lion kepada Terdakwa Ismiwati Koda adalah saksi sendiri dengan cara setelah berkas kendaraan masuk ke Samsat Halmahera Timur Terdakwa Ismiwati Koda menghubungi saksi menanyakan pembayaran pajak dan Terdakwa Ismiwati Koda menawarkan kepada saksi untuk mengambil sendiri uang pembayaran pajak di Ternate dan pada tahun 2018 hampir setiap bulan saksi menyerahkan uang pembayaran pajak kendaraan kepada Terdakwa Ismiwati Koda, di beberapa tempat antaranya di bandara Sultan Babullah, Pelabuhan speed boat semut, di rumah kaka Terdakwa Ismiwati Koda di perumahan Kodim Ternate juga sebanyak 6 (enam) kali membayar pajak melalui transfer kerekening Terdakwa Ismiwati Koda;

Halaman 57 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke Ternate Terdakwa Ismiwati Koda menelpon saksi dan meminta saksi menemui ditempat-tempat tersebut, itulah sebabnya penyerahan uang pajak kendaraan selalu berbeda tempat;
- Bahwa Terdakwa Zulwahyu juga menerima penyerahan uang pajak kendaraan dari saksi 4(empat) kali antaranya di samping CV Lion Ternate,
- Bahwa cara Terdakwa Zulwahyu menerima penyerahan uang pajak kendaraan dari saksi, awalnya Terdakwa Zulwahyu menelpon saksi dan menanyakan pembayaran pajak kendaraan terhadap berkas dari CV Lion yang telah masuk ke samsat Haltim dan Terdakwa Zulwahyu menawarkan untuk mengambil sendiri uang pembayaran pajak kendaraan dan setelah Terdakwa tiba di Ternate datang disamping CV Lion dengan mobil dan saksi serah uang ke Terdakwa didalam mobilnya atau juga Terdakwa datang dengan sepeda motor juga datang disamping kantor Lion tersebut,
- Bahwa pada tahun 2018 ada 562 unit kendaraan roda dua merek Honda terdiri dari beberapa type yang CV Lion membayar pajak dan STNK di Kantor Samsat Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak diberikan lembaran asli karena blangko asli tidak ada;
- Bahwa setiap pembayaran Terdakwa Ismawati Koda hanya tunjukan notes dan tabel kolektif dari bendahara baru saksi bayar namun ditabel tersebut tidak ada yang tanda tangan hanya hasil print saja;
- Bahwa saksi pernah menitipkan uang pembayaran pajak kendaraan kepada Kepala Kantor Samsat Haltim yaitu Terdakwa Zulwahyu selaku Kepala Kantor dan Bendahara Ismiwati Koda;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bosori dalam rangka untuk mendapat penetapan pajak kendaraan kemudian saksi ke Bendahara melakukan pembayaran;
- Bahwa proses pembayaran pajak di kendaraan bermotor dan mobil, awalnya wajib pajak datang menghadap Kasi Penetapan setelah itu Kasi penetapan menentukan besaran pajak dan ke Bendahara membayar;
- Bahwa saksi tidak tahu lembaran setoran pajak lembaran satu dengan lembaran yang lain beda-beda sedangkan wajib pajak dan kendaraan yang sama itu terjadi karena dicetak secara manual sehingga hasilnya lembaran

Halaman 58 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diarsip nilai rendah dan lembaran yang disetorkan ke wajib pajak dan Dispenda nilainya besar;

- Bahwa yang para Terdakwa lakukan adalah manipulasi data tentang besar kecilnya pajak dari kendaraan baru menjadi kendaraan tua ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan bagian penetapan di Samsat Haltim tetapi saksi berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa secara normal dalam pencetakan notes pajak dapat diroboh oleh yang membuat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

9. Saksi ISMIWATI KODA :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyelewengan uang pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyelewengan penerimaan pajak di kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, karena dipanggil di Kejaksaan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara penerimaan pada UPTB Samsat Halmahera Timur yaitu;
 1. Menerima uang pajak dari wajib pajak kendaraan bermotor, menyimpan bukti pajak dan menyetorkan uang pajak;
 2. Menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pendapatan APBD pada SKPD;
- Bahwa sewaktu saksi sebagai Bendahara Penerimaan, yang menjadi Kepala Kantor Samsat Halmahera Timur adalah Terdakwa Zulwahyu A.Usman;
- Bahwa penerimaan pajak yang saksi kelola untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Baru (BBN-KB1)
 3. Bea Balik Nama Kendaraan Lama/mutasi (BBN-KB2)
- Bahwa jumlah pendapatan daerah penerimaan pajak kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) tahun 2018 sekitar 4 (empat) milyar dari 1000 (seribu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB SWDKLLI;
 - Bahwa penerimaan pajak kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat) berbeda-beda tergantung merek kendaraan, tahun pembuatan dan kapasitas mesin;
 - Bahwa prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, awalnya dealer kendaraan bermotor meminta perincian pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan baru kemudian saksi memberitahukan perincian kepada dealer melalui pesan whatsapp berapa jumlah PKB dan BBN-KB1 yang mereka bayarkan berdasarkan table perhitungan pajak kendaraan bermotor yang diterbitkan badan pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku Utara, setelah mereka transfer pembayaran pajak kendaraan tersebut ke rekening pribadi saksi di Bank Mandiri juga saksi terima langsung pembayaran pajak dari dealer saat saksi di Ternate, kemudian Kasi Penetapan Sdr Bosori mengeluarkan nominal rincian PKB, BBN-KB1 dan SWDKLLI untuk dimasukan ke dalam blanko surat ketetapan pajak daerah oleh operator sdr Sahdan Jamin dan Harianto Panjab lalu dicetak dan diserahkan ke Loker Kepolisian agar disatukan dengan STNK yang diterbitkan Kepolisian dan uang pembayaran pajak yang saksi terima dari dealer tersebut lalu saksi tarik tunai dan di setorkan ke rekening kas daerah Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa untuk kendaraan ulang, pemilik kendaraan wajib pajak datang langsung ke Kantor Samsat dan menyetorkan PKB nya ke Bank BRI setelah mendapatkan nominal pajak yang harus dibayar dari Kasi Penetapan selanjutnya blanko surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI dicetak dan diserahkan kepada pemilik wajib pajak;
 - Bahwa untuk mutasi kendaraan, pemilik kendaraan/wajib pajak yang akan memutasi kendaraannya dari luar daerah ke Samsat Morotai atau membalik nama kendaraannya kepada kepada pemilik baru datang langsung dengan membawa berkas kendaraannya ke Kantor Samsat untuk didaftarkan ke

Halaman 60 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loket Kepolisian setelah terdaftar di Kepolisian berkas kendaraan tersebut diserahkan ke loket Samsat untuk dibuatkan perincian PKB dan BBN-KB2 oleh Kasi Penetapan setelah pemilik membayar PKB dan BBN-KB2nya di Bank BRI kemudian operator memasukkan perincian PKB dan BBN-KB2nya dalam blanko surat Ketetapan Pajak daerah untuk dicetak;

- Bahwa blanko surat ketetapan ada 5 rangkap sebagai berikut;
 1. Lembar 1 untuk wajib pajak warna coklat;
 2. Lembar 2 untuk BPKPAD warna biru;
 3. Lembar 3 untuk Jasa Rahardja warna hijau;
 4. Lembar 4 untuk arsip Kantor Samsat warna merah;
 5. Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.
- Bahwa dealer yang mentransfer dan menipiskan uang pajak kendaraan baru yaitu dealer sepeda motor Honda Lion dan Dealer mobil Hino dan uang pajak tersebut ada yang saksi setor dan ada yang saksi tidak setor ke Kas Daerah;
- Bahwa pada tahun 2018 yang saksi tidak setor ke Kas daerah adalah bea balik nama kendaraan baru BBN-BK1 roda 2 (dua) dan roda (empat) sekitar 100 Juta lebih dari lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI;
- Bahwa saksi tidak menyeter ke kas daerah bea balik nama kendaraan baru BBN-KB1 roda 2(dua) dan roda 4(empat) dengan cara menghilangkan nilai BBN-KB yang seharusnya tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLI pada lembar ke-3 untuk Jasa Raharja dan lembar ke-4 untuk BPKPAD Provinsi dengan cara tidak memasukan nominal BBN-KB dalam surat ketetapan pajak daerah kendaraan baru tersebut;
- Bahwa hanya lembar ke-2 dan lembar ke-4 yang dihilangkan, karena lembar ke-4 untuk BPKPAD dan lembar ke-3 untuk Jasa Raharja yang akan dilampirkan dalam bukti setoran ke Kas Daerah di Bank BRI;
- Bahwa untuk menghilangkan nilai BBN-BK dan BBN-KB1 atas inisiatif saksi sendiri yang menyuruh operator dan Kepala Kantor Samsat yaitu

Halaman 61 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zulwahyu memintah menghilangkan nilai BBN-KB pada lembar ke 3 dan lembar ke 4 surat ketetapan pajak sekitar 100 lembar lebih;

- Bahwa yang bertugas sebagai operator adalah Sahda Jamin dan harianto Panjab keduanya pegawai honor;
- Bahwa uang dari hasil pajak tersebut saksi gunakan sendiri dan Terdakwa ada juga uang pajak kendaraan yang langsung diambil Terdakwa dari dealer sepeda motor Honda Lion;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang pajak dari dealer, karena ketika saksi telpon di dealer sdr Indra memberitahukan Terdakwa ada mengambil uang sekitar 50 juta pajak kendaraan dari dealer kami dan saksi konfirmasi kepada Terdakwa membenarkan ia mengambil uang pajak dengan alasan ada keperluan;
- Bahwa dari Kantor samsat ada kirimkan laporan seluruh wajib pajak melakukan pengurusan BBN-KB tahun 2018 ke BPKPAD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa biasanya dari dealer sdr Indra menelpon saksi mengatakan ada kendaraan baru yang akan dibayar pajak dan berkas kendaraan yang akan diurus pajaknya ada ditiptkan kepada sdr Rahman Konoras sebagai Baur di Kantor Samsat Halmahera Timur dan saksi menanyakan berapa uang pajak yang akan dibayar sekitar 20 juta sampai 30 juta untuk 20 sampai 30 unit sepeda motor dan jika saksi ada di Ternate maka sdr Indra akan serahkan kepada saksi tetapi jika saksi ada di Halmahera Timur maka sdr Indra akan transfer uang tersebut kerekening saksi di Bank Mandiri dan sdr Indra telah beberapa kali memberi langsung uang pembayaran pajak kendereraan kepada saksi yaitu di Bandara Ternate di Perumahan Kodim Ternate samping Bank BNI dan di Taman Nukila Ternate sekitar 20 juta sampai 30 juta;
- Bahwa tanggal cetak blanko tidak sama pencetakan surat ketetapan pajak PKB/BBN-KB dan SWDKLLI dicetak di nantinya Kantor samsat Halmahera Timur menunggu pengurusan kelengkapan berkas kendaraan dari Ditlantas Polda Maluku Utara selesai BPKB dan Nomor Polisi sekitar 2 minggu kemudian baru berkas kendaraan diterima di kantor Samsat Halmahera

Halaman 62 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur baru dicetak sekitar 1 bulan kemudian jika blankonya habis menunggu blanko dari Provinsi;

- Bahwa sdr. H. Abukar yang menghubungi saksi lewat telpon mengatakan ada unit kendaraan baru yang akan dibayar pajak dan berkas kendaraan akan diurus pajak di kantor Samsat Halmahera Timur dan ditipkan kepada sdr Rahman Konoras lalu saksi menanyakan kepada H Abubakar berapa uang pajak yang akan dibayar sdr H Abubakar katakana sekitar 20 juta sampai 50 juta untuk 1 sampai 2 unit dump truck dan jita saksi ada di Ternate maka uang tersebut di antarkan kepada saksi tetapi jika saksi ada di Halmahera Tiimur maka nanti saksi ada di Ternate baru diserahkan uang itu, diantaranya sekitar tanggal 26 Agustus 2018 saksi pernah menerima pembayaran pajak dan STNK dengan Nomor Polisi DG 8011 UT atas nama Adul Rahim Asri Rp.18.931.000,- dan DG 8024 UT atas nama Rahel Desi Resimaran Rp.31.958.000,- terima di Taman Nukila Ternate dan di rumah makan Pondok Katu Ternate dan uang tersebut saksi lupa setor ke Kas daerah;
- Bahwa ada inisiatif Terdakwa menyuruh operator menghilangkan nilai BBN-KB pada lembar 3 dan lembar 4, lebih dari empat kali Terdakwa mengatakan kepada saksi mengambil kebijakan untuk keperluan pribadinya seperti bertemu dengan wartawan dan dari Inspektorat dengan mengatakan "pakai dulu BBN-KB kalau pajak setoran saja" sehingga saksi memintah operator untuk tidak memasukan nilai BBN-KB dalam surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-BK dan SWDKLLI kendaraan baru sehingga saksi menyiapkan berkas-berkas kendaraan dan menyerahkan kepada operator untuk menghilangkan nilai pada lembar 3 dan lembar 4 pada surat atau blanko tersebut dan uang dari menghilangkan nilai itu sekira 5 kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 20 juta sampai 50 juta ;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari uang penerimaan pajak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi gunakan membeli makan malam 15 orang pegawai honorer dan lainnya saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi Ismiwati menerima uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari setoran dealer;

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari CV Liong juga meminta saksi mencetak surat penetapan pajak daerah menghilangkan nilai BBN-KB pada lembar 2 dan lembar 4 ;
- Bahwa pendaftaran dan pengurusan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak hanya datang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- Bahwa kerugian negra sekitar Rp. 632.930.067,- (enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang pajak sebesar Rp. 432.930.067 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa secara normal dalam pencetakan notes pajak dapat dirobah oleh yang membuat;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Kantor Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Blangko notes pajak dari Badan Samsak Propinsi yang berikan dan disimpan ruangan Bendahara;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang Ahli yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Nani Riana Pakaya, S.Pt. :

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli pernah dipanggil oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan surat permintaan Nomor B-/020/Q.2.5/Fd.1/08/2020 tanggal 24 Agustus dan surat tugas Inspektur

Halaman 64 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara Nomor 700/06/165/ITPROP tanggal 26 Agustus 2020 guna melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi penyelewengan atas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, anggaran tahun 2018;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keahlian sebagai auditor sebagai berikut;
 - Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara tindak pidana korupsi pada UPTB Samsat Halmahera Tengah tahun anggaran 2017;
 - Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara tindak pidana korupsi pada Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2017;
 - Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara tindak pidana korupsi pada UPTB Samsat Kota Ternate tahun anggaran 2017;
 - Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara tindak pidana korupsi pada UPTB Sula tahun anggaran 2017;
 - Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara tindak pidana korupsi pada UPTB Samsat Halmahera Barat tahun anggaran 2017;
 - Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara tindak pidana korupsi Anggaran Hibah Dana Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini Ahli sebagai auditor dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan Daerah ;
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar perhitungan kerugian keuangan Daerah yaitu;
 - Data dari Dealer dan bukti Scan Notice pajak antara Surat Penetapan Pajak Daerah pada lembar 3 (Jasa Raharja) dan lembar 4 dimana penerimaan BBn-KB dan PKB sesungguhnya tercantum pada lembar 3 namun pada lembar 4 telah dirubah tidak sesuai dengan penerimaan yang sesungguhnya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah;

Halaman 65 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menyampaikan surat kepada Inspektorat Provinsi bantuan perhitungan kerugian Negara dan atas permintaan tersebut Inspektorat Provinsi menerbitkan surat perintah tugas dan menunjuk Ahli sebagai auditor dan mengundang Tim auditor Kejaksaan Tinggi sebagai penyidik melakukan gelar perkara dan menyerahkan berupa hasil pemeriksaan dan barang bukti berupa surat ketetapan pajak daerah yang diterbitkan oleh UPTB Samsat Halmahera Timur tahun 2018 pada lembar ke 3 (untuk arsip Jasa Raharja) dan pada lembar ke 4 (untuk arsip Samsat) serta dokumen lainnya berupa data-data dari dealer;
- Bahwa cara Ahli melakukan audit terhadap penerimaan pajak, yaitu dengan cara membandingkan notice pajak lembar ke 3 (untuk Jasa Raharja) dan lembar 4 (untuk Samsat) dan data dari dealer maka ditemukan perbedaan nilai pendapatan yang tercantum pada lembar 3 (Jasa Raharja dan data dealer dengan data pada lembar 4 (Samsat) dimana nilai pendapatan riil yang diterima dengan modus merubah bentuk nilai pendapatan dan jenis type kendaraan;
- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.632.930.067.00,- (enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Nilai Kerugian (Rp)	Pengembalian
1. Terdapat Penerimaan Pajak Tidak disetor ke Kas Daerah	186.717.509,00	
2. Terdapat Penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan modus operandi sebagai berikut :		
a) Pendaftaran Kendaraan Baru ke Mutasi (Modifikasi) menghilangkan BBn-KB 1 dan mengalihkan Nilai yang sudah dikurangi ke BBn-KB 2	2.418.000,00	
b) Pendaftaran Kendaraan Baru di alihkan ke Pendaftaran Ulang (Penul) : menghilangkan nilai BBn-KB 1	187,378,925,00	
c) Mengurangi nilai PKB untuk Kendaraan Mutasi	7,559,850,00	
d) Menghilangkan BBn-KB2 dan mengurangi nilai PKB pada Kendaraan yang dimutasi	34,774,560,00	
e) Mengurangi Nilai PKB terhadap Kendaraan Pendaftaran Ulang (Penul)	29.059.968,00	
f) Menyetor Pendapatan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak	81.213.625,00-	
3. Terdapat Pendapatan dari Dealer atas Kendaraan Baru Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua tidak dilaporkan sebagai Pendapatan dengan modus operandi sbb :		
a) melakukan pengurangan nilai BBn-KB 1 yang dikenakan untuk Kendaraan Baru dengan Modus Operandi dialihkan menjadi Kendaraan Mutasi sehingga nilai BBn-KB 1 dikurangi dan dialihkan menjadi BBn-KB2 untuk pengurusan Kendaraan Mutasi	49,688,430,00	
pengurusan dari Dealer atas Kendaraan Baru yang tidak ditemukan Notice Pajak	54,119,200,00	
Total Kerugian	Rp. 632.930.067,	Rp.0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah selama 1 tahun kami sudah memberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian Negara;
- Bahwa Terdakwa di audit untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum Terdakwa membenarkannya;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTB Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa di angkat sebagai Kepala UPTB Samsat Halmahera Timur sejak tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, dengan tugas Penyusunan Program kerja dan kegiatan UPTB berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan, Pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasi penyusunan rencana UPTB atas dasar keterpaduan kebijakan BPKAD, melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian teknis tugas IPTB, Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas secara berkala;
- Bahwa mekanisme pembayaran pajak di UPTB Samsat Halmahera Timur, wajib pajak langsung atau kendaraan baru pihak dealer datang ke loket 1 bagian penelitian berkas dan registrasi dari Kepolisian untuk pendaftaran berkas dengan melampirkan KTP, Faktur bermotor, cek fisik untuk kendaraan baru, dan setelah dilakukan penelitian di loket 1 berkas tersebut diserahkan ke loket 3 bagian penetapan pajak untuk menghitung tarif pajak, bea balik nama kendaraan bermotor PKB, BBNKB dan SWDKKJ, setelah diperhitungkan tarif pajak atas pendaftaran kendaraan bermotor oleh bagian penetapan pajak selanjutnya wajib pajak menerima lembar perhitungan tarif pajak yang harus dibayar, ada yang langsung dibayar ke

Halaman 68 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI dan ada yang dititipkan ke Bendahara penerimaan untuk dibayarkan yang nantinya disetorkan ke Bank secara kolektif, setelah wajib pajak melakukan pembayaran sesuai tarif pajak yang ditentukan kemudian setelah itu dilakukan pencetakan surat ketetapan pajak daerah oleh bendahara penerima dan serahkan ke loket 5 pencetakan STNK dan setelah surat ketetapan pajak dan pengesahan STNK selesai kemudian diserahkan kepada wajib pajak;

- Bahwa jumlah notice blanko pajak yang diterima oleh Samsat Halmahera Timur dari Badan Samsat Provinsi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 1000 blanko notice;
- Bahwa jenis pendaftaran kendaraan bermotor yaitu;
 - Pendaftaran kendaraan baru balik nama BBN-KB kendaraan baru dan BBNK-2 balik nama dari pemilik pertama ke pemilik kedua;
 - Pendaftaran ulang perpanjangan masa pajak tahunan;
 - Pendataran mutasi kendaraan masuk maupun keluar;
- Bahwa besar pendapatan pajak dari kendaraan bermotor sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp.142.413.846, (seratus empat puluh dua juta empat ratus tigas belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian;
 - Penerimaan dan penyetoran PKB Rp. 86.689.457;
 - Penerimaan BBN-KB1 dan penyetoran Rp.47.600.250;
 - Penerimaan BBN-KB2 dan penyetoran Rp.5.802.000;
 - Penerimaan denda PKB dan penyetoran Rp.2.322.139;
- Bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor selama periode 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 belum bisa ditentukan;
- Bahwa besar pendapatan pajak dari kendaraan bermotor sejak 01 April sampai dengan 30 April 2018 sebesar Rp.541.436.432, (lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam empat ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian;
 - Penerimaan dan penyetoran PKB Rp. 145.769.329;

Halaman 69 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan BBN-KB1 dan penysetoran Rp.380.388.250;
- Penerimaan BBN-KB2 dan penysetoran Rp.10.077.700;
- Penerimaan denda PKB dan penysetoran Rp.5.201.153;
- Bahwa berdasarkan dokumen besar pendapatan pajak dari kendaraan bermotor sejak tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.212.621.150, (dua ratus dua belas juta enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian;
 - Penerimaan dan penysetoran PKB Rp. 92.422.857;
 - Penerimaan BBN-KB1 dan penysetoran Rp.108.971.201;
 - Penerimaan BBN-KB2 dan penysetoran Rp. 8.869.800;
 - Penerimaan denda PKB dan penysetoran Rp.2.357.292;
- Bahwa berdasarkan dokumen, besar pendapatan pajak dari kendaraan bermotor sejak 01 Juni sampai dengan 29 Juni 2018 sebesar Rp.122.183.103, (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah) dengan rincian;
 - Penerimaan dan penysetoran PKB Rp. 56.672.958;
 - Penerimaan BBN-KB1 dan penysetoran Rp.62.56.1850;
 - Penerimaan BBN-KB2 dan penysetoran Rp. 1.109.000;
 - Penerimaan denda PKB dan penysetoran Rp.1.884.295;
- Bahwa berdasarkan dokumen besar pendapatan pajak dari kendaraan bermotor sejak 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2018 sebesar Rp.566.758.709, (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan rupiah) dengan rincian;
 - Penerimaan dan penysetoran PKB Rp. 153.822.177;
 - Penerimaan BBN-KB1 dan penysetoran Rp 407.436.750;
 - Penerimaan BBN-KB2 dan penysetoran Rp. 2.341.500;
 - Penerimaan denda PKB dan penysetoran Rp.3.158.282;

Halaman 70 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap akhir bulan membuat laporan dan saksi menugaskan kepada Terdakwa Ismiwati selaku bendahara dan dibantu Harianto (Pegawai Honorer) untuk membuat laporan pertanggung jawaban fisik dan realisasi penerimaan dan penyetoran pajak atas kendaraan bermotor;
- Bahwa pada tahun 2018 belum ada petugas Bank untuk menerima setoran pajak;
- Bahwa kepala seksi penetapan pajak sdr Bosori jarang masuk kantor dan staf sdr Halid Agil (Pegawai Honorer) yang melaksanakan tugasnya;
- Bahwa berdasarkan laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Samsat Halmahera Timur bulan Februari sampai dengan dengan bulan Mei 2018 dari surat ketetapan pajak PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ ditemukan 17 Notice pajak atas kendaraan baru, 7 kendaraan pendaftaran ulang dan 2 kendaraan mutasi dengan penerimaan pajak tidak disetor sebanyak Rp.186.717.509,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas lima ratus sembilan rupiah);
- Bahwa didepan Persidangan diperlihatkan oleh Majelis kepada Terdakwa barang bukti surat keketapan pajak kendaraan bermotor sebanyak 108 lembar yang dicetak oleh Samsat Hakmahera Timur saksi membenarkan ada perbedaan pada lembar 3 untuk Jasa Raharja dan lembar 4 untuk BPKPAD Provinsi Maluku Utara ada perbedaan nilai pajak yaitu terjadi selisi sebesar Rp.187.378.925,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang titipan dari sdr Indra dealer sepeda motor honda CV Lion sebanyak 70 juta saksi tidak setor namun dibuat notes pajaknya;
- Bahwa pernah Terdakwa beberapa kali menyuruh saksi Ismiwati mengambil kebijakan mencetak surat keketapan pajak kendaraan bermotor sebanyak 108 lembar kemudian Terdakwa Ismiwati memintah operator Hariyanto Pegawai honor untuk tidak memasukan nilai BBN-KB dalam surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-BK dan SWDKLLJ kendaraan baru sehingga operator menghilangkan nilai pada lembar 3 untuk Jasa Raharja dan lembar 4 untuk BPKPAD Provinsi sehingga terjadi selisi sebesar Rp.187.378.925,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh

Halaman 71 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan uang dari menghilangkan nilai itu Terdakwa Ismiwati memberikan uang kepada saksi sekitar Rp.70 juta ;

- Bahwa Terdakwa menerima uang semua sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan sebagian uang itu Rp. 432.930.067 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) saksi tidak tahu siapa yang ambil;
- Bahwa biaya yang disetorkan ke kas daerah atas kendaraan bermotor adalah :
 - Kendaraan baru yaitu BBN-KB1 dan PKB;
 - Kendaraan mutasi yaitu BBN-KB2 dan PKB;
 - Pendaftaran ulang yaitu PKB;
- Bahwa Terdakwa Ismiwati terimana uang titipan dari dealer Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke Kas daerah;
- Bahwa selama tahun 2018 pernah 3 kali Terdakwa menerima uang transportasi setiap kali Terdakwa ke Ternate sebanyak Rp.3.000.000,- sampai Rp.5.000.000,- untuk harga tiket pulang pergi Ternate Halmahera Timur dan uang tersebut Terdakwa akui berasal dari sumber yang tidak resmi tidak sesuai ketentuan yaitu uang dari hasil pencetakan surat ketetapan pajak daerah dari dealer yang sering dititipkan kepada saksi Ismiwati Koda;
- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.632.930.067,- (enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengembalikan itu kerugian negara;
- Bahwa uang yang diterima tersebut saksi tidak membeli sesuatu;
- Terhadap barang bukti yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

No	Jumlah	Barang/Dokumen	Atas Nama pemilik	Keterangan
1.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
2.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
3.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RSUD MABA	DG 8100 HT
4.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4614 T
5.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4620 T
6.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MOH. KANDUNG	DG 2817 TB
7.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET H	DG 2842 TB
8.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4644 T
9.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AYU NISMAWATI	DG 2851 TA
10.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARNI	DG 5260 T
11.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	BAMBANG SLAMET SISWANTO	DG 2128 TD
12.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RONAL TOLOAN	DG 1415 T
13.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FEBRI RAHARDianto	DG 2206 TD
14.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURSIA SALEH	DG 1419 T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI DESYANTI	DG 2293 TD
16.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANADA ROSY ISWAHYUDI	DG 2340 TD
17.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURSANTI ADE	DG 5033 TA
18.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMIT PASSY	DG 3987 TB
19.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RASITO	DG 6337 T
20.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDURAHMAN HAIRUDIN	DG 3904 TB
21.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IBRAHIM MALIK	DG 3902 TB
22.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SALMAN AL FARIS	DG 3903 TB
23.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI WAHYUNI	DG 3990 TB
24.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASIAH	DG 3992 TB
25.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RIFKA PUTRI PRATAMI	DG 2012 TD
26.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RITA SALIHI	DG 5040 TA
27.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMAIL DJURUBASA	DG 5045 TA
28.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAMIUN FACATLE	DG 2014 TD
29.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DESA TELAGA JAYA	DG 2339 HT
30.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD DJAILAN	DG 5041 TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4)		
31.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURWADI	DG 2011 TC
32	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UCI SANUSI	DG 2001 TC
33	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTOMO AYUB	DG 3997 TB
34	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	CUCU ASMANA	DG 3994 TB
35	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAIS GUAMO	DG 2005 TC
36	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KASBUN	DG 3995 TB
37	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	BOBI TUNANG	DG 2008 TC
38	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUHARTI MARSIDIK	DG 3996 TB
39	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARMEON KALAKA	DG 2022 TD
40	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NENENG GITA WAHYUNI	DG 2068 TD
41	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LASER PANDAPOTAN GULTOM	DG 2010 TC
42	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAMID SENEN	DG 3988 TB
43	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ATI KUESTINAH	DG 2006 TC
44	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LATIFA DJAILAN	DG 3991 TB
45	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAMANIA PAUWAH,S.AG	DG 3998 TB
46	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB	EKO SUDARMASIH	DG 2004 TC

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan SWDKLLJ (lembar 4)		
47	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RASMIYEM	DG 2007 TC
48	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAIMAN	DG 2003 TC
49	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SATUNI	DG 2032 TD
50	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YOHNIS TERU	DG 2009 TC
51	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET ARIFIN	DG 2046 TD
52	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURNOMO	DG 2086 TD
53	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDUL AZIZ MUZARAB	DG 1211 T
54	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RISNO	DG 3961 TB
55	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YARNI SURYANA TEA	DG 3962 TB
56	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRIYANI	DG 3967 TB
57	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMIT HI.MA'BUD	DG 3974 TB
58	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WAGIYAH	DG 2031 TD
59	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHTAR HAJI MUHAMAD	DG 2047 TD
60	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARWAN HASAN	DG 3712 TB
61	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YELFIANA SUSU	DG 3775 TB
62	1 (satu) lembar	Surat Ketetapan Pajak	MARSELUS MOI	DG 3931

Halaman 76 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli	Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LEUWAYAN	TB
63	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMAIL DJURUBASA	DG 3717 TB
64	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADRI POUI	DG 3872 TB
65	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HERUN PURNAMI	DG 3934 TB
66	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARDI MAULANA	DG 3754 TB
67	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KENG KAMARIBA	DG 2103 TD
68	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	REYNOLD ANDRE TUMALANG	DG 2104 TD
69	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DARLISA HI.ALI	DG 2093 TD
70	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RUBIYATI	DG 2094 TD
71	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUGENG	DG 3868 TB
72	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANDI YANI	DG 3713 TB
73	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YOFENUS M. BUDIMAN	DG 2059 TD
74	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MAJID DJINA	DG 2126 TD
75	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISBAT HAMJAH	DG 2073 TD
76	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARINUS WAROBAL	DG 3927 TB
77	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ALI MUSOLIH	DG 3925 TB

Halaman 77 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAIFUL SETIAWAN	DG 3937 TB
79	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FAESAL ALBAR	DG 3944 TB
80	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HENGKI KAOI	DG 3941 TB
81	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANWAR M. NUR	DG 3953 TB
82	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI RAHAYU	DG 2108 TD
83	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET	DG 2110 TD
84	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WANDONO	DG 2113 TD
85	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUSTINA MUJIB	DG 2117 TD
86	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUPARMIWATI	DG 2120 TD
87	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MESERI	DG 2124 TD
88	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADE SALMAN,SKM.M,K ES	DG 3774 TB
89	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KARTINI	DG 3867 TB
90	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PARWATI	DG 2080 TD
91	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WASIS AMANTO	DG 2083 TD
92	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RETNO	DG 2085 TD
93	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUKARDI SONINGA	DG 2123 TD

Halaman 78 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4)		
94	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SEFETUNA MOTJOR	DG 3776 TB
95	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WENAS SALASA	DG 3871 TB
96	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YAPET MANGENGEDE BARAHAMA	DG 3707 TB
97	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RISTINA STIORINI	DG 3870 TB
98	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NONCE DIAS	DG 3694 TB
99	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FITRIANI HUSIN	DG 2144 TD
100	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LA ODE MAZRIN	DG 2190 TD
101	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HASIM LA ABU	DG 2150 TD
102	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YANCE ANO	DG 2148 TD
103	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MELKIANUS NABI	DG 2149 TD
104	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DESA TANURE	DG 2007 TP
105	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAIKAL SYUKUR	DG 2084 TD
106	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SENI SURYANI	DG 2116 TD
107	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WIDOYONO	DG 2207TD
108	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAKARTIKA	DG 2107 TD
109	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB	EDY HARTONO	DG 2114 TD

Halaman 79 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan SWDKLLJ (lembar 4)		
110	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARIFATU HASANA	DG 2118 TD
111	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	THOYIBAH	DG 2119 TD
112	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IRWANTO KAHAR	DG 2154 TD
113	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUS SUYATNO	DG 2115 TD
114	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADI SUNARTO	DG 2079 TD
115	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MAHRONI	DG 2125 TD
116	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUAIB H. TAMSIL	DG 2082 TD
117	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASEHAT	DG 2139 TD
118	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGNESIA ITA PURNAMASARI	DG 3721 TB
119	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDUL KADER SALASA	DG 2122 TD
120	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MIAN	DG 3968 TB
121	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YERMIAS Y LAUMBUR	DG 2011 TD
122	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD FAHROZI	DG 2015 TD
123	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FAIDIN MUHAMAD	DG 2016 TD
124	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HIRWAN A.RAHMAN	DG 2013 TD
125	1 (satu) lembar	Surat Ketetapan Pajak	SLAMET	DG 2034



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli	Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MULYANTO	TC
126	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURDIN HADI	DG 1409 T
127	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SOLATUN	DG 2201 TD
128	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WILIAM LEMONTJINA	DG 3970 TB
129	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASIRUN	DG 3972 TB
130	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WIDODO	DG 2196 TD
131	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	TONY HARTONO	DG 6331 T
132	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHAMAD CHIRUL ANWAR	DG 8099TU
133	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YUDI SETIAWAN EFENDI	DG1801 TU
134	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WANISA UAT	DG 1297 T
135	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD BARMAWI	DG 5131 T
136	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUPRIADI UMAR	DG 5380 T
137	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UGENG SETIONO	DG 8417 T
138	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	JOKO WAHAB	DG 8103 TU
139	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADNAN HASANUDIN, ST	DG 1402 T
140	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUSANA	DG 8001 UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PONIMIN, SPD	DG 1403 T
142	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTIYAH	DG 8187 T
143	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	H. SITI MAWANI	DG 1407 T
144	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI ASTINI	DG 8002 UT
145	1 (satu) lembar Asli1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HJ. SITI MAWANI	DG 8506 T
146	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LASANE LAHAJI	DG 8506 T
147	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAMLY MARASABESSY	DG 1006 UT
148	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTRISMAN	DG 8510 T
149	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAHRAN UAT	DG 2206 T
150	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YANTO SUNARYO	DG 2937 TB
151	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN	DG 2203
152	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SYUKUR WASHAB	DG 5706 T
153	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHAMAD ANSAR	DG 2779TB
154	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SABINGATUN	DG 2516 T
155	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURIYONO	DG 6207 7
156	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURNOMO	DG 5488 T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4)		
157	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUS SALIM	DG 5334 T
158	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WAHYU NINGSIA BAHRUDIN	DG 2760 TA
159	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	QOBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
160	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 5)	QUBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
161	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KASTAM	DG 2331 TB
162	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MISITUN	DG 8102 T
163	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MANOPO ABD KADIR	DG 1210 T
164	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PEMERINTAH KAB. HALTIM	DG 134 HT
165	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UDIN ALI	DG 5075 T
166	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	VERA TANDEAN	DG 6018 T
167	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HENDRI PAIDUN	DG 2414 TB
168	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 160 HT
169	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 157 HT
170	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5280 HT
171	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN	DG 5283 HT

Halaman 83 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



		4)	TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	
172	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5281 HT
173	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5278 HT
174	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUKIR	DG 2966 TA
175	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAMIADI	DG 8052 T
176	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IKRAM SYAFI	DG 5428 T
177	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHTAR TOMAI, SE	DG 8509 T
178	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAMID SABAN	DG 5390 T
179	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	GAZALI M TAHIR	DG 2511 TB
180	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARNI AMINUDIN	DG 2762 TA
181	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARSINO	DG 2906 TA
182	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AAN RIYADI. S.SOS	DG 2722 TB
183	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SALMA YUSUF	DG 2530 TA
184	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NAHROWI	DG 8005 UT
185	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WADUD KIPU	DG 2074 TD
186	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB	SRIANINGSIH	DG 1401 T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan SWDKLLJ (lembar 1)		
187	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BAMBANG HARYANTO, Spd	DG 1400 T
188	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
189	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	RSUD MABA	DG 8100 HT
190	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
191	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BPKAD KAB. HALTIM	DG 1003 TP
192	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BPKD HALTIM	DG 1004 TP
193	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ABDULLAH MOLOGOTU	DG 1412 T
194	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ARIS BUDIYONO	DG 1007 UT
195	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	LATIFA DJAILAN	DG 1413 T
196	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	DINAS KESEHATAN KAB. HALTIM	DG 9001 TP
197	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MUNIR Hi. SALIM	DG 1418 T
198	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SEKRETARIAT DPRD KAB.HALTIM	DG 1006 TP
199	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SEKRETARIAT DPRD KAB.HALTIM	DG 1007 TP
200	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SAFRI ANDI	DG 1012 UT
201	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MOHAMAD ALI SODIKIN	DG 1423 T
202	1 (satu) lembar	Surat Ketetapan Pajak	MUSLIM	DG 1429 T



	copy scan	Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	DJURUBASA	
203	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SENDI PAIDUN	DG 1412 T
204	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MAJID DJINA	DG 1437 T
205	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	AAN RIYADI	DG 1438 T
206	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ISMAIL DJURU BASA	DG 1452 T
207	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MISNAINI	DG 1461 T
208	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	YORDAN LABUANG	DG 1466 T
209	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BURHAN HI. ADAM	DG 1467 T
210	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
211	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
212	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RSUD MABA	DG 8100 HT
213	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4614 T
214	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4620 T
215	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MOH. KANDUNG	DG 2817 TB
216	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET H	DG 2842 TB
217	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4644 T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AYU NISMAWATI	DG 2851 TA
219	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARNI	DG 5260 T
220	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	BAMBANG SLAMET SISWANTO	DG 2128 TD
221	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RONAL TOLOAN	DG 1415 T
222	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FEBRI RAHARDIANTO	DG 2206 TD
223	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURSIA SALEH	DG 1419 T
224	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI DESIYANTI	DG 2293 TD
225	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ANADA ROSY ISWAHYUDI	DG 2340 TD
226	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURSANTI ADE	DG 5033 TA
227	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMIT PASSY	DG 3987 TB
228	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RASITO	DG 6337 T
229	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDURAHMAN HAIRUDIN	DG 3904 TB
230	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IBRAHIM MALIK	DG 3902 TB
231	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SALMAN AL FARIS	DG 3903 TB
232	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI WAHYUNI	DG 3990 TB
233	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASIAH	DG 3992 TB

Halaman 87 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3)		
234	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RIFKA PUTRI PRATAMI	DG 2012 TD
235	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RITA SALIHI	DG 5040 TA
236	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMAIL DJURUBASA	DG 5045 TA
237	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAMIUN FACATLE	DG 2014 TD
238	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DESA TELAGA JAYA	DG 2339 HT
239	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD DJAILAN	DG 5041 TA
240	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURWADI	DG 2011 TC
241	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UCI SANUSI	DG 2001 TC
242	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTOMO AYUB	DG 3997 TB
243	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	CUCU ASMANA	DG 3994 TB
244	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAIS GUAMO	DG 2005 TC
245	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KASBUN	DG 3995 TB
246	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	BOBI TUNANG	DG 2008 TC
247	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUHARTI MARSIDIK	DG 3996 TB
248	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARMEON KALAKA	DG 2022 TD
249	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB	NENENG GITA WAHYUNI	DG 2068 TD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan SWDKLLJ (lembar 3)		
250	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LASER PANDAPOTAN GULTOM	DG 2010 TC
251	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAMID SENEN	DG 3988 TB
252	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ATI KUESTINAH	DG 2006 TC
253	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LATIFA DJAILAN	DG 3991 TB
254	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAMANIA PAUWAH,S.AG	DG 3998 TB
255	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	EKO SUDARMASIH	DG 2004 TC
256	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RASMIYEM	DG 2007 TC
257	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAIMAN	DG 2003 TC
258	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SATUNI	DG 2032 TD
259	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YOHNIS TERU TERU	DG 2009 TC
260	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET ARIFIN	DG 2046 TD
261	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURNOMO	DG 2086 TD
262	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDUL AZIZ MUZARAB	DG 1211 T
263	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RISNO	DG 3961 TB
264	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YARNI SURYANA TEA	DG 3962 TB
265	1 (satu) lembar	Surat Ketetapan Pajak	SRIYANI	DG 3967

Halaman 89 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli	Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		TB
266	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMIT HI.MA'BUD	DG 3974 TB
267	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WAGIYAH	DG 2031 TD
268	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHTAR HAJI MUHAMAD	DG 2047 TD
269	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARWAN HASAN	DG 3712 TB
270	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YELFIANA SUSU	DG 3775 TB
271	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARSELUS MOI LEUWAYAN	DG 3931 TB
272	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMAIL DJURUBASA	DG 3717 TB
273	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADRI POUI	DG 3872 TB
274	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HERUN PURNAMI	DG 3934 TB
275	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARDI MAULANA	DG 3754 TB
276	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KENG KAMARIBA	DG 2103 TD
277	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	REYNOLD ANDRE TUMALANG	DG 2104 TD
278	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DARLISA HI.ALI	DG 2093 TD
279	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RUBIYATI	DG 2094 TD
280	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUGENG	DG 3868 TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ANDI YANI	DG 3713 TB
282	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YOFENUS BUDIMAN M.	DG 2059 TD
283	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MAJID DJINA	DG 2126 TD
284	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISBAT HAMJAH	DG 2073 TD
285	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HENGKI KAOI	DG 3941 TB
286	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI RAHAYU	DG 2108 TD
287	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET	DG 2110 TD
289	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WANDONO	DG 2113 TD
290	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUSTINA MUJIB	DG 2117 TD
291	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUPARMIWATI	DG 2120 TD
292	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MESERI	DG 2124 TD
293	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADE SALMAN,SKM.M,K ES	DG 3774 TB
294	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KARTINI	DG 3867 TB
295	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PARWATI	DG 2080 TD
296	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WASIS AMANTO	DG 2083 TD
297	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RETNO	DG 2085 TD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3)		
298	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUKARDI SONINGA	DG 2123 TD
299	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SEFETUNA MOTJOR	DG 3776 TB
300	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WENAS SALASA	DG 3871 TB
301	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YAPET MANGENGEDE BARAHAMA	DG 3707 TB
302	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RISTINA STIORINI	DG 3870 TB
303	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NONCE DIAS	DG 3694 TB
304	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FITRIANI HUSIN	DG 2144 TD
305	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LA ODE MAZRIN	DG 2190 TD
306	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HASIM LA ABU	DG 2150 TD
307	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YANCE ANO	DG 2148 TD
308	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MELKIANUS NABI	DG 2149 TD
309	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DESA TANURE	DG 2007 TP
310	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAIKAL SYUKUR	DG 2084 TD
311	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SENI SURYANI	DG 2116 TD
312	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WIDOYONO	DG 2207TD
313	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB	SAKARTIKA	DG 2107 TD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan SWDKLLJ (lembar 3)		
314	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	EDY HARTONO	DG 2114 TD
315	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARIFATU HASANA	DG 2118 TD
316	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	THOYIBAH	DG 2119 TD
317	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IRWANTO KAHAR	DG 2154 TD
318	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUS SUYATNO	DG 2115 TD
319	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADI SUNARTO	DG 2079 TD
320	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MAHRONI	DG 2125 TD
321	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUAIB H. TAMSIL	DG 2082 TD
322	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASEHAT	DG 2139 TD
323	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDUL KADER SALASA	DG 2122 TD
324	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MIAN	DG 3968 TB
325	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YERMIAS Y LAUMBUR	DG 2011 TD
326	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD FAHROZI	DG 2015 TD
327	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FAIDIN MUHAMAD	DG 2016 TD
328	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HIRWAN A.RAHMAN	DG 2013 TD
329	1 (satu) lembar	Surat Ketetapan Pajak	SLAMET	DG 2034



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli	Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MULYANTO	TC
330	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURDIN HADI	DG 1409 T
331	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SOLATUN	DG 2201 TD
332	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WILIAM LEMONTJINA	DG 3970 TB
333	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASIRUN	DG 3972 TB
334	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WIDODO	DG 2196 TD
335	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	TONY HARTONO	DG 6331 T
336	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHAMAD CHIRUL ANWAR	DG 8099TU
337	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YUDI SETIAWAN EFENDI	DG1801 TU
338	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WANISA UAT	DG 1297 T
339	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD BARMAWI	DG 5131 T
340	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUPRIADI UMAR	DG 5380 T
341	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UGENG SETIONO	DG 8417 T
342	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	JOKO WAHAB	DG 8103 TU
343	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADNAN HASANUDIN, ST	DG 1402 T
344	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUSANA	DG 8001 UT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PONIMIN, SPD	DG 1403 T
346	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTIAH	DG 8187 T
347	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	H. SITI MAWANI	DG 1407 T
348	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI ASTINI	DG 8002 UT
349	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HJ. SITI MAWANI	DG 8506 T
350	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LASANE LAHAJI	DG 8506 T
351	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAMLY MARASABESSY	DG 1006 UT
352	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTRISMAN	DG 8510 T
353	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAHRAN UAT	DG 2206 T
354	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YANTO SUNARYO	DG 2937 TB
355	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN	DG 2203
356	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SYUKUR WASHAB	DG 5706 T
357	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHAMAD ANSAR	DG 2779TB
358	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SABINGATUN	DG 2516 T
359	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURIYONO	DG 6207 7
360	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB	PURNOMO	DG 5488 T

Halaman 95 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan SWDKLLJ (lembar 3)		
361	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUS SALIM	DG 5334 T
362	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WAHYU NINGSIA BAHURUDIN	DG 2760 TA
363	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	QOBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
364	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	QUBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
365	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KASTAM	DG 2331 TB
366	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MISITUN	DG 8102 T
367	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MANOPO ABD KADIR	DG 1210 T
368	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PEMERINTAH KAB. HALTIM	DG 134 HT
369	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UDIN ALI	DG 5075 T
370	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	VERA TANDEAN	DG 6018 T
371	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HENDRI PAIDUN	DG 2414 TB
372	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 160 HT
373	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 157 HT
374	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5280 HT
375	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB	DINAS PERHUBUNGAN	DG 5283 HT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan SWDKLLJ (lembar 3)	DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	
376	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5281 HT
377	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5278 HT
378	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUKIR	DG 2966 TA
379	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAMIADI	DG 8052 T
380	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IKRAM SYAFI	DG 5428 T
381	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHTAR TOMAIDI, SE	DG 8509 T
382	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAMID SABAN	DG 5390 T
383	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	GAZALI M TAHIR	DG 2511 TB
384	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARNI AMINUDIN	DG 2762 TA
385	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARSINO	DG 2906 TA
386	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AAN RIYADI. S.SOS	DG 2722 TB
387	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SALMA YUSUF	DG 2530 TA
388	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NAHROWI	DG 8005 UT
389	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WADUD KIPU	DG 2074 TD
390	Asli 1 (satu) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Januari 2018.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)- Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)
391	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan April 2018. <ul style="list-style-type: none">- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)- Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)
392	Copy 1 (satu) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Mei 2018. <ul style="list-style-type: none">- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)- Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)
393	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Juni 2018. <ul style="list-style-type: none">- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)- Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)
394	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Juli 2018. <ul style="list-style-type: none">- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)- Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)
395	Copy 1 (satu) lembar STNKB No Seri 00603974 dan copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sementara atas nama RAHEL DESI RESIMARAN dengan No.Pol. DG 8024 UT dengan jumlah sebesar Rp. 31.958.000,-	
396	Copy 1 (satu) lembar STNKB No Seri 12816460 dan copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sementara atas nama ABDUL RAHIM ASRI dengan No.Pol. DG 8011 UT dengan jumlah sebesar Rp. 18.931.000,-	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH adalah Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23 / KEP / ADM-MU / 57 / 2017 tanggal 9 Agustus 2017 ;
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Samsat Kabupaten Halmahera Timur, berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Samsat Se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Maluku Utara adalah untuk memimpin, menyusun kebijakan mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada bulan **Februari 2018** sampai dengan **Mei 2018** terdakwa tidak menyetorkan penerimaan uang pajak kendaraan bermotor ke- Kas Daerah, sejumlah **17** (tujuh belas) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor yang telah di terbitkan, dengan nilai

Halaman 98 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar Rp. 186.717,509,- (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan rupiah).

- Bahwa penetapan pajak yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai ketentuan yang sebenarnya, sehingga hasil uang yang diperoleh dari penetapan pajak yang dibuat oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 342.404.928,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan cara dan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada notice lembar ke 4 (arsip Samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 (kendaraan baru) dan mengalihkan nilai yang sudah di kurangi ke biaya BBN-KB 2 dari 1 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 2.418.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. Pada notice lembar ke 4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 dari 108 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 187.378.925,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan mengurangi nilai biaya PKB untuk kendaraan mutasi dari 9 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 7.559.850,- (tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - d. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan Biaya BBN-KB 2 dan mengurangi nilai PKB pada kendaraan yang dimutasikan dari 23 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 34.774.560,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - e. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara mengurangi nilai PKB terhadap kendaraan Pendaftaran Ulang dari 36 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 29.059.968,- (dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor dari dealer atas kendaraan baru roda empat dan kendaraan roda 2, dari 4 notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 103.807.630,-

Halaman 99 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan cara dan rincian sebagai berikut :

- a. Melakukan pengurangan nilai BBN-KB 1 dari kendaraan baru menjadi kendaraan mutasi (BBN-KB 2), dan tidak melaporkan sebagai pendapatan daerah, dari 4 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 49.688.430,- (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Menerima uang pengurusan kendaraan baru dari daerah akan tetapi tidak ditemukan notice pajak dan belum dilaporkan sebagai pendapatan keuangan daerah dari 3 data notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 54.119.200,- (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH bersama-sama dengan ISMIWATI KODA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), hal ini sesuai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang di tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/219.1-Insp.P/MU/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada UPTB Samsat Halmahera Timur Tahun 2018 terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara, dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)	Pengembalian
1.	Terdapat Penerimaan Pajak Tidak disetor ke Kas Daerah	186.717.509,00	
2.	Terdapat Penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan modus operandi sebagai berikut :		
a)	Pendaftaran Kendaraan Baru ke Mutasi (Modifikasi) menghilangkan BBn-KB 1 dan mengalihkan Nilai yang sudah dikurangi ke BBn-KB 2	2.418.000,00	
b)	Pendaftaran Kendaraan Baru di alihkan ke Pendaftaran Ulang (Penul) : menghilangkan nilai BBn-KB 1	187.378.925,00	
c)	Mengurangi nilai PKB untuk Kendaraan Mutasi	7.559.850,00	
d)	Menghilangkan BBn-KB2 dan mengurangi nilai PKB pada Kendaraan yang dimutasi	34.774.560,00	
e)	Mengurangi Nilai PKB terhadap Kendaraan Pendaftaran Ulang (Penul)	29.059.968,00	
f)	Menyetor Pendapatan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak	81.213.625,00-	
3.	Terdapat Pendapatan dari Dealer atas Kendaraan Baru Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua tidak dilaporkan sebagai Pendapatan dengan modus operandi sbb :		
a)	melakukan pengurangan nilai BBn-KB 1 yang dikenakan untuk Kendaraan Baru dengan Modus Operandi dialihkan menjadi Kendaraan Mutasi sehingga nilai BBn-KB 1 dikurangi dan dialihkan menjadi BBn-KB2 untuk pengurusan Kendaraan Mutasi	49.688.430,00	
	pengurusan dari Dealer atas Kendaraan Baru yang tidak ditemukan Notice Pajak	54.119.200,00	
	Total Kerugian	Rp. 632.930.067,	Rp.0,-



- Bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengakui kerugian negara tersebut akibat perbuatannya dan perbuatan saksi ISMAWATI KODA, namun terdakwa hanya mengakui menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa hingga saat ini belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut;



Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAHA Bin DEDE NUCH, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAHA Bin DEDE NUCH, dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "*unsur secara melawan hukum*" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 / PUU – IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH adalah Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23 / KEP / ADM-MU / 57 / 2017 tanggal 9 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Samsat Se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Maluku Utara adalah untuk memimpin, menyusun kebijakan mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan **Febuari 2018** sampai dengan **Mei 2018** terdakwa bersama-sama dengan saksi Ismawati Koda tidak menyetorkan penerimaan uang pajak kendaraan bermotor ke Kas Daerah, sejumlah 17 (tujuh belas) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor yang telah di terbitkan, dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp. 186.717,509,- (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa penetapan pajak yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai ketentuan yang sebenarnya, hasil uang yang diperoleh dari ketetapan pajak yang dibuat oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 342.404.928,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), ketidak sesuaian tersebut dilakukan dengan cara dan rincian sebagai berikut :

- a. Pada notice lembar ke 4 (arsip Samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 (kendaraan baru) dan mengalihkan Nilai yang sudah di kurangi ke biaya BBN-KB 2 dari 1 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 2.418.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- b. Pada notice lembar ke 4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 dari 108 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 187.378.925,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- c. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan mengurangi nilai biaya PKB untuk kendaraan mutasi dari 9 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 7.559.850,- (tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- d. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan Biaya BBN-KB 2 dan mengurangi nilai PKB pada kendaraan yang dimutasikan dari 23 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 34.774.560,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- e. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara mengurangi nilai PKB terhadap kendaraan Pendaftaran Ulang dari 36 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 29.059.968,- (dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor dari dealer atas kendaraan baru roda empat dan kendaraan roda 2, dari 4 notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 103.807.630,- (seratus tiga



juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan cara dan rincian sebagai berikut :

- a. Melakukan pengurangan nilai BBN-KB 1 dari kendaraan baru menjadi kendaraan mutasi (BBN-KB 2), dan tidak melaporkan sebagai pendapatan daerah, dari 4 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 49.688.430,- (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- b. Menerima uang pengurusan kendaraan baru dari daerah akan tetapi tidak ditemukan notice pajak dan belum dilaporkan sebagai pendapatan keuangan daerah dari 3 data notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 54.119.200,- (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH bersama-sama dengan saksi Ismawati Koda telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi Ismawati Koda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang di tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/219.1-Insp.P/MU/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada UPTB Samsat Halmahera Timur Tahun 2018 terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara, kerugian keuangan negara sebesar Rp. 632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Uraian	Nilai Kerugian (Rp)	Pengembalian
1. Terdapat Penerimaan Pajak Tidak disetor ke Kas Daerah	186.717.509,00	
2. Terdapat Penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan modus operandi sebagai berikut :		
g) Pendaftaran Kendaraan Baru ke Mutasi (Modifikasi) menghilangkan BBn-KB 1 dan mengalihkan Nilai yang sudah dikurangi ke BBn-KB 2	2.418.000,00	
h) Pendaftaran Kendaraan Baru di alihkan ke Pendaftaran Ulang (Penul) : menghilangkan nilai BBn-KB 1	187,378,925,00	
i) Mengurangi nilai PKB untuk Kendaraan Mutasi	7,559,850,00	
j) Menghilangkan BBn-KB2 dan mengurangi nilai PKB pada Kendaraan yang dimutasi	34,774,560,00	
k) Mengurangi Nilai PKB terhadap Kendaraan Pendaftaran Ulang (Penul)	29.059.968,00	
l) Menyetor Pendapatan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak	81.213.625,00-	
3. Terdapat Pendapatan dari Dealer atas Kendaraan Baru Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua tidak dilaporkan sebagai Pendapatan dengan modus operandi sbb :		
b) melakukan pengurangan nilai BBn-KB 1 yang dikenakan untuk Kendaraan Baru dengan Modus Operandi dialihkan menjadi Kendaraan Mutasi sehingga nilai BBn-KB 1 dikurangi dan dialihkan menjadi BBn-KB2 untuk pengurusan Kendaraan Mutasi	49,688,430,00	
pengurusan dari Dealer atas Kendaraan Baru yang tidak ditemukan Notice Pajak	54,119,200,00	
Total Kerugian	Rp. 632.930.067,	Rp.0,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangannya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur dengan menggunakan dana Penerimaan Kendaraan Pajak Bermotor pada periode bulan Februari sampai dengan Mei tahun 2018 di luar peruntukannya yakni untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, perbuatan terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH bersama dengan saksi ISMIWATI KODA telah bertentangan dengan:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 122 ayat (4), Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- b) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;
- d) Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Samsat Se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur bersama-sama dengan saksi ISMAWATI KODA selaku bendahara UPTB Samsat Halmahera Timur, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), hal ini sesuai keterangan Ahli NANI RIANA PAKAYA, S.Pt., dari Inspektorat Propinsi Maluku Utara dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nomor : 700/219.1-Insp.P/MU/2020 tanggal 2 September 2020 dan pengakuan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Unsur Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah-bukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan “**memperkaya**” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur tidak menyetorkan ke-Kas Daerah penerimaan uang pajak kendaraan bermotor periode bulan Februari 2018 sampai dengan Mei 2018, dari 17 (tujuh belas) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor yang telah di terbitkan seluruhnya sebesar Rp. 186.717,509,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penetapan pajak tidak sesuai ketentuan, dengan hasil uang yang diperoleh seluruhnya sebesar Rp. 342.404.928,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan cara dan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada notice lembar ke 4 (arsip Samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 (kendaraan baru) dan mengalihkan Nilai yang sudah dikurangi ke biaya BBN-KB 2 dari 1 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 2.418.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. Pada notice lembar ke 4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan biaya BBN-KB 1 dari 108 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 187.378.925,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan mengurangi nilai biaya PKB untuk kendaraan mutasi dari 9 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 7.559.850,- (tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - d. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara menghilangkan Biaya BBN-KB 2 dan mengurangi nilai PKB pada kendaraan yang dimutasikan dari 23 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 34.774.560,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - e. Pada notice lembar ke-4 (arsip samsat) dengan cara mengurangi nilai PKB terhadap kendaraan Pendaftaran Ulang dari 36 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 29.059.968,- (dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor dari dealer atas kendaraan baru roda empat dan kendaraan roda 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 4 notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 103.807.630,- (seratus tiga juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan cara dan rincian sebagai berikut :

- a. Melakukan pengurangan nilai BBN-KB 1 dari kendaraan baru menjadi kendaraan mutasi (BBN-KB 2), dan tidak melaporkan sebagai pendapatan daerah, dari 4 notice pajak, seluruhnya sebesar Rp. 49.688.430,- (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Menerima uang pengurusan kendaraan baru dari daerah akan tetapi tidak ditemukan notice pajak dan belum dilaporkan sebagai pendapatan keuangan daerah dari 3 data notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 54.119.200,- (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, mempergunakan uang hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor periode bulan Februari 2018 sampai dengan Mei 2018, untuk: **kepentingan pribadi Terdakwa**, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa menggunakan uang hasil Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), dan selebihnya kerugian negara tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa seluruh Dana Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ismawati Koda belum dikembalikan Terdakwa hingga saat ini;
 - Bahwa adapun uang yang dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ismiwati Koda adalah sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tujuh rupiah), uang tersebut berasal dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut, telah menguntungkan Terdakwa selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur bersama-sama dengan saksi Ismawati Koda, selaku bendahara penerimaan pada UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 112 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menikmati uang yang berasal dari Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor Kabupaten Halmahera Timur, selaku Kepala UPTB Samsat yang melaksanakan kegiatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, namun sesuai pengakuan Terdakwa, yang ia nikmati hanya Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) yang sumbernya dari pemberian bendaharan pengeluaran Ismawati Koda sejumlah Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan yang diambil dari pemotongan pajak secara langsung Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), sedangkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tujuh rupiah), yang selebihnya terdakwa tidak mengetahuinya, sedangkan pengakuan bendahara pengeluaran saksi ISMAWATI KODA yang dinikmatinya dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut hanya Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan selebihnya dinyatakan tanggungjawab Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa, apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi maupun barang bukti, Terdakwa tidak terbukti menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada periode bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018 yang diterimanya yang sebagian dana tersebut dipergunakan oleh ISMIWATI KODA yaitu sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa telah mengakui dan terbukti sesuai dengan Pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Terdakwa telah memakai uang hasil Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor tersebut untuk kepentingan terdakwa ;

Halaman 113 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang atau kerugian negara yang dimaksud, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan kerugian negara seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa tidak bertambah kaya akibat perbuatannya mempergunakan Dana Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018 untuk pribadinya dan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi**” adalah adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan baik menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa benar tidak menyetorkan penerimaan uang pajak kendaraan bermotor ke-Kas Daerah pada bulan **Februari** sampai dengan bulan **Mei** 2018 sebanyak 17(Tujuh belas) Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah diterbitkan, jumlah yang tidak disetorkan Terdakwa adalah sebesar Rp. 186.717,509,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan penetapan pajak tidak sesuai ketentuan, dengan hasil uang yang diperoleh seluruhnya sebesar Rp. 342.404.928,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dan Terdakwa juga tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor dari dealer atas kendaraan baru roda empat dan kendaraan roda 2, dari 4 notice pajak seluruhnya sebesar Rp. 103.807.630,- (seratus tiga juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tidak disetorkan dan digunakan Terdakwa untuk pribadinya dan saksi Ismawati Koda adalah sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa uang penerimaan pajak yang digunakan Terdakwa tersebut sampai saat ini belum dikembalikan ke Kas Daerah, sehingga kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMIWATI KODA adalah sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), dana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa tersebut berasal dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur pada periode bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018, oleh karenanya atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ISMIWATI KODA, telah bertujuan untuk menguntungkan Terdakwa selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur dan saksi ISMIWATI KODA selaku bendahara penerimaan atas pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan segahagian lagi digunakan oleh bendahara pengeluaran, hal ini sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur telah terbukti mempergunakan Dana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk dirinya sendiri dengan cara, tidak menyetor penerimaan pajak kendaraan bermotor, melakukan penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan roda dua, oleh karenanya dari segi perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut telah dapat disimpulkan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara menggunakan kewenangannya selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang atau kerugian negara yang dimaksud, namun karena kemampuan keuangan terdakwa hingga saat ini tidak memungkinkan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, sehingga terdakwa menyatakan belum dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan atas perbuatan terdakwa dan saksi Ismawati Koda;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa sendiri maupun orang lain dan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), maka terhadap unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur: “**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei Tahun 2018, dan sebagian uang hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi ISMIWATI KODA untuk kepentingan Terdakwa dan saksi ISMIWATI KODA, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Propinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/219.1-Insp.P/MU/2020 tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa dari seluruh hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei Tahun 2018, setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur tersebut, maka sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Propinsi Maluku Utara telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), hal ini terjadi karena Terdakwa dan saksi ISMIWATI KODA dalam melakukan tugasnya selaku Kepala dan Bendahara Penerimaan pada UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur atas Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor, telah dengan sengaja tidak menyetor pajak ke Kas Daerah, melakukan penetapan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan juga Terdakwa bersama saksi ISMIWATI KODA tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor yang diterimanya, pada hal Terdakwa sendiri mengetahui hasil pajak yang diterimanya tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu, yaitu Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH, selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur telah terbukti, mempergunakan kewenangannya dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, Pasal 122 ayat (4), yang berbunyi : *"Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1(satu) hari kerja"*, dalam hal ini Terdakwa

Halaman 118 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penerimaan uang pajak kendaraan bermotor, namun sesuai kewenangan yang dipercayakan kepada Terdakwa, telah disalahgunakan Terdakwa, uang hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut seharusnya disetor ke Kas Daerah, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pajak kendaraan bermotor tersebut ke Kas Daerah, melainkan uang hasil penerimaan pajak tersebut digunakan Terdakwa untuk **kepentingan pribadi Terdakwa sendiri bersama-sama dengan saksi ISMIWATI KODA;**

Menimbang, bahwa dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut, sebahagian telah digunakan Terdakwa bersama saksi ISMAWATI KODA, yaitu sejumlah Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), yang seharusnya penerimaan uang pajak tersebut disetorkan ke Kas Daerah, namun atas kewenangan yang dimiliki Terdakwa selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur bersama-sama dengan saksi ISMAWATI KODA selaku Bendahara Penerimaan pada UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur, telah menyalahgunakan hasil penerimaan uang pajak kendaraan tersebut untuk kepentingan diri Terdakwa dan saksi ISMIWATI KODA, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur dalam persidangan telah mengakui bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018 untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain dengan cara : Tidak menyetorkan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut ke Kas Daerah; Melakukan penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan; Tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor, padahal Terdakwa mengetahui, bahwa uang hasil penerimaan pajak tersebut harus disetor ke Kas Daerah, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan tugas dan Jabatan Terdakwa selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur,

Halaman 119 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



menggunakan kewenangannya dengan cara **“tidak menyetor uang hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor ke Kas Umum Daerah, melakukan penetapan pajak tidak sesuai dengan ketentuan, tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor”**, padahal terdakwa selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun Terdakwa telah, menyalah gunakan kewenangannya, sehingga tindakan dan perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan saksi ISMIWATI KODA

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur: **“Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara”** adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat meruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan merugikan perekonomian negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik negara, yang oleh negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian ; Bahwa akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri-sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan sipelaku ; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri-sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa benar, dalam perkara a quo telah nyata adanya Kerugian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Kerugian Kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), dalam persidangan Terdakwa menyatakan **“akan mengembalikan uang atau kerugian negara yang dimaksud yaitu sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah), akan tetapi**



hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dari fakta hukum lainnya yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan Keuangan negara, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan kerugian negara tersebut juga telah diakui hal itu terjadi akibat perbuatan Terdakwa dan saksi IMIWATI KODA ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur "**Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan".

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian ;

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang menyuruh melakukan" adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa "orang yang turut melakukan" diartikan sebagai 'bersama-sama melakukan' dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata adanya perbuatan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH selaku Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur dan saksi ISMIWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODA.selaku bendahara penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur, yaitu tidak menyetorkan ke Kas Daerah penerimaan uang pajak kendaraan bermotor pada periode bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2018 yang nilainya sebesar Rp.186.717.509,-(seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus Sembilan rupiah); melakukan penetapan pajak tidak sesuai ketentuan, sehingga pajak kendaraan bermotor tersebut tidak masuk ke Kas Daerah melainkan untuk terdakwa sebesar Rp. 103.807.630,- (seratus tiga juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah); tidak melaporkan pendapatan uang pajak kendaraan bermotor dari dealer atas kendaraan baru roda 4(empat) dan kendaraan roda 2(dua), dari 4(empat) notice pajak , dengan nilai seluruhnya Rp.103.807.630,-(seratus tiga juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tigapuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, telah nyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMIWATI KODA yaitu secara bersama-sama menikmati hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku dan yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara adalah Terdakwa dan saksi ISMAWATI KODA, dengan demikian dapat disimpulkan **Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan penuntut umum Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMIWATI KODA, oleh karenanya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut haruslah dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi Ismiwati Koda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi hanya sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan yang diperoleh saksi ISMIWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODA sesuai pengakuannya yaitu sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), oleh karena harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH dan kepada saksi ISMAWATI KODA tidak diketahui secara pasti jumlahnya, maka dengan demikian uang pengganti tersebut haruslah dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peranan masing-masing Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH dan kepada saksi ISMAWATI KODA ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan Hasil Laporan Inspektorat Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) dan hasil Laporan Inspektorat Daerah Maluku Utara tersebut telah diakui Terdakwa dan saksi Ismawati Koda dalam persidangan, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi akibat perbuatan Terdakwa dan saksi IMIWATI KODA, oleh karenanya uang pengganti atas kerugian negara akan dijatuhkan sesuai peranan masing-masing Terdakwa dan saksi ISMIWATI KODA, dan dalam hal ini Majelis berpendapat, uang pengganti atas kerugian negara tersebut haruslah dijatuhkan kepada Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH sejumlah Rp.432.930.067,- dan kepada saksi ISMAWATI KODA sejumlah Rp.200.000.000,-(Duaratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menikmati harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka terdakwa haruslah di hukum untuk membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur diatas terbukti bahwa Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH belum mengembalikan sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi yang jumlahnya sebesar Rp.632.930.067,- (Enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah

Halaman 123 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga masih memiliki tanggungan, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan hukum untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang mengatur penjatuhan pidana dengan memperhatikan nilai kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHP dan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut hukum masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat .
- Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara, seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat;
- Terdakwa tidak berterusterang dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana dan belum mengembalikan harta benda yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana korupsi tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan dan sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Halaman 125 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAHA Bin DEDE NUCH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAHA Bin DEDE NUCH dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAHA Bin DEDE NUCH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**" Secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAHA Bin DEDE NUCH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ZULWAHYU A. USMAN SJAHA Bin DEDE NUCH sebesar Rp. 432.930.067,- (*empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh tujuh rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Jumlah	Barang/Dokumen	Atas Nama	Keterangan
----	--------	----------------	-----------	------------

Halaman 126 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pemilik	gan
1.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
2.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
3.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RSUD MABA	DG 8100 HT
4.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4614 T
5.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4620 T
6.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MOH. KANDUNG	DG 2817 TB
7.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET H	DG 2842 TB
8.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURYONO	DG 4644 T
9.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AYU NISMAWATI	DG 2851 TA
10.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARNI	DG 5260 T
11.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	BAMBANG SLAMET SISWANTO	DG 2128 TD
12.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah	RONAL TOLOAN	DG 1415 T

Halaman 127 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



		PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
13.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FEBRI RAHARDIANTO	DG 2206 TD
14.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURSIA SALEH	DG 1419 T
15.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI DESIYANTI	DG 2293 TD
16.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANADA ROSY ISWAHYUDI	DG 2340 TD
17.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURSANTI ADE	DG 5033 TA
18.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMIT PASSY	DG 3987 TB
19.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RASITO	DG 6337 T
20.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDURAHMAN HAIRUDIN	DG 3904 TB
21.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IBRAHIM MALIK	DG 3902 TB
22.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SALMAN AL FARIS	DG 3903 TB
23.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI WAHYUNI	DG 3990 TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASIAH	DG 3992 TB
25.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RIFKA PUTRI PRATAMI	DG 2012 TD
26.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RITA SALIH	DG 5040 TA
27.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMAIL DJURUBASA	DG 5045 TA
28.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAMIUN FACATLE	DG 2014 TD
29.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DESA TELAGA JAYA	DG 2339 HT
30.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD DJAILAN	DG 5041 TA
31.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURWADI	DG 2011 TC
32.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UCI SANUSI	DG 2001 TC
33.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTOMO AYUB	DG 3997 TB
34.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	CUCU ASMANA	DG 3994 TB
35.	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	RAIS GUAMO	DG 2005 TC

Halaman 129 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
36	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KASBUN	DG 3995 TB
37	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	BOBI TUNANG	DG 2008 TC
38	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUHARTI MARSIDIK	DG 3996 TB
39	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARMEON KALAKA	DG 2022 TD
40	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NENENG GITA WAHYUNI	DG 2068 TD
41	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LASER PANDAPOTAN GULTOM	DG 2010 TC
42	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAMID SENEN	DG 3988 TB
43	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ATI KUESTINAH	DG 2006 TC
44	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LATIFA DJAILAN	DG 3991 TB
45	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAMANIA PAUWAH,S.AG	DG 3998 TB
46	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	EKO SUDARMASIH	DG 2004 TC
47	1 (satu)	Surat Ketetapan	RASMIYEM	DG 2007

Halaman 130 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



	lembar Asli	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		TC
48	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAIMAN	DG 2003 TC
49	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SATUNI	DG 2032 TD
50	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YOHNIS TERU	DG 2009 TC
51	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET ARIFIN	DG 2046 TD
52	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURNOMO	DG 2086 TD
53	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDUL AZIZ MUZARAB	DG 1211 T
54	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RISNO	DG 3961 TB
55	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YARNI SURYANA TEA	DG 3962 TB
56	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRIYANI	DG 3967 TB
57	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMIT HI.MA'BUD	DG 3974 TB
58	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar	WAGIYAH	DG 2031 TD



		4)		
59	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHTAR HAJI MUHAMAD	DG 2047 TD
60	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARWAN HASAN	DG 3712 TB
61	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YELFIANA SUSU	DG 3775 TB
62	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARSELUS MOI LEUWAYAN	DG 3931 TB
63	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISMAIL DJURUBASA	DG 3717 TB
64	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADRI POUI	DG 3872 TB
65	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HERUN PURNAMI	DG 3934 TB
66	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARDI MAULANA	DG 3754 TB
67	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KENG KAMARIBA	DG 2103 TD
68	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	REYNOLD ANDRE TUMALANG	DG 2104 TD
69	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DARLISA HI.ALI	DG 2093 TD
70	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah	RUBIYATI	DG 2094 TD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
71	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUGENG	DG 3868 TB
72	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANDI YANI	DG 3713 TB
73	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YOFENUS M. BUDIMAN	DG 2059 TD
74	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MAJID DJINA	DG 2126 TD
75	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ISBAT HAMJAH	DG 2073 TD
76	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARINUS WAROBAL	DG 3927 TB
77	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ALI MUSOLIH	DG 3925 TB
78	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAIFUL SETIAWAN	DG 3937 TB
79	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FAESAL ALBAR	DG 3944 TB
80	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HENGKI KAOI	DG 3941 TB
81	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ANWAR M. NUR	DG 3953 TB

Halaman 133 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



82	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI RAHAYU	DG 2108 TD
83	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET	DG 2110 TD
84	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WANDONO	DG 2113 TD
85	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUSTINA MUJIB	DG 2117 TD
86	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUPARMIWATI	DG 2120 TD
87	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MESERI	DG 2124 TD
88	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADE SALMAN,SKM.M,K ES	DG 3774 TB
89	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KARTINI	DG 3867 TB
90	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PARWATI	DG 2080 TD
91	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WASIS AMANTO	DG 2083 TD
92	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RETNO	DG 2085 TD
93	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	SUKARDI SONINGA	DG 2123 TD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
94	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SEFETUNA MOTJOR	DG 3776 TB
95	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WENAS SALASA	DG 3871 TB
96	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YAPET MANGENGEDE BARAHAMA	DG 3707 TB
97	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RISTINA STIORINI	DG 3870 TB
98	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NONCE DIAS	DG 3694 TB
99	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FITRIANI HUSIN	DG 2144 TD
100	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LA ODE MAZRIN	DG 2190 TD
101	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HASIM LA ABU	DG 2150 TD
102	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YANCE ANO	DG 2148 TD
103	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MELKIANUS NABI	DG 2149 TD
104	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KANTOR DESA TANURE	DG 2007 TP
105	1 (satu)	Surat Ketetapan	HAIKAL SYUKUR	DG 2084

Halaman 135 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



	lembar Asli	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		TD
106	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SENI SURYANI	DG 2116 TD
107	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WIDOYONO	DG 2207TD
108	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAKARTIKA	DG 2107 TD
109	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	EDY HARTONO	DG 2114 TD
110	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARIFATU HASANA	DG 2118 TD
111	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	THOYIBAH	DG 2119 TD
112	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IRWANTO KAHAR	DG 2154 TD
113	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUS SUYATNO	DG 2115 TD
114	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADI SUNARTO	DG 2079 TD
115	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MAHRONI	DG 2125 TD
116	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar	SUAIB H. TAMSIL	DG 2082 TD



		4)		
117	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASEHAT	DG 2139 TD
118	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGNESIA ITA PURNAMASARI	DG 3721 TB
119	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ABDUL KADER SALASA	DG 2122 TD
120	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MIAN	DG 3968 TB
121	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YERMIAS LAUMBUR Y	DG 2011 TD
122	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD FAHROZI	DG 2015 TD
123	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	FAIDIN MUHAMAD	DG 2016 TD
124	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HIRWAN A.RAHMAN	DG 2013 TD
125	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SLAMET MULYANTO	DG 2034 TC
126	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURDIN HADI	DG 1409 T
127	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SOLATUN	DG 2201 TD
128	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah	WILIAM LEMONTJINA	DG 3970 TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)		
129	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NASIRUN	DG 3972 TB
130	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WIDODO	DG 2196 TD
131	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	TONY HARTONO	DG 6331 T
132	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHAMAD CHIRUL ANWAR	DG 8099TU
133	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YUDI SETIAWAN EFENDI	DG1801 TU
134	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WANISA UAT	DG 1297 T
135	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AHMAD BARMAWI	DG 5131 T
136	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUPRIADI UMAR	DG 5380 T
137	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UGENG SETIONO	DG 8417 T
138	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	JOKO WAHAB	DG 8103 TU
139	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ADNAN HASANUDIN, ST	DG 1402 T

Halaman 138 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



140	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUSANA	DG 8001 UT
141	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PONIMIN, SPD	DG 1403 T
142	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTIAH	DG 8187 T
143	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	H. SITI MAWANI	DG 1407 T
144	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SRI ASTINI	DG 8002 UT
145	1 (satu) lembar Asli1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HJ. SITI MAWANI	DG 8506 T
146	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	LASANE LAHAJI	DG 8506 T
147	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	RAMLY MARASABESSY	DG 1006 UT
148	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SUTRISMAN	DG 8510 T
149	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAHRAN UAT	DG 2206 T
150	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	YANTO SUNARYO	DG 2937 TB
151	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	KANTOR DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN	DG 2203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 4)		
152	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SYUKUR WASHAB	DG 5706 T
153	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHAMAD ANSAR	DG 2779TB
154	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SABINGATUN	DG 2516 T
155	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NURIYONO	DG 6207 7
156	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PURNOMO	DG 5488 T
157	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AGUS SALIM	DG 5334 T
158	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WAHYU NINGSIA BAHRUDIN	DG 2760 TA
159	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	QOBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
160	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 5)	QUBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
161	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KASTAM	DG 2331 TB
162	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MISITUN	DG 8102 T
163	1 (satu)	Surat Ketetapan	MANOPO ABD	DG 1210

Halaman 140 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



	lembar Asli	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	KADIR	T
164	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	PEMERINTAH KAB. HALTIM	DG 134 HT
165	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	UDIN ALI	DG 5075 T
166	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	VERA TANDEAN	DG 6018 T
167	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HENDRI PAIDUN	DG 2414 TB
168	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 160 HT
169	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 157 HT
170	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5280 HT
171	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5283 HT
172	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5281 HT
173	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5278 HT
174	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar	SUKIR	DG 2966 TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4)		
175	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SAMIADI	DG 8052 T
176	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	IKRAM SYAFI	DG 5428 T
177	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MUHTAR TOMAIDI, SE	DG 8509 T
178	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	HAMID SABAN	DG 5390 T
179	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	GAZALI M TAHIR	DG 25II TB
180	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	ARNI AMINUDIN	DG 2762 TA
181	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	MARSINO	DG 2906 TA
182	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	AAN RIYADI. S.SOS	DG 2722 TB
183	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	SALMA YUSUF	DG 2530 TA
184	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	NAHROWI	DG 8005 UT
185	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 4)	WADUD KIPU	DG 2074 TD
186	1 (satu)	Surat Ketetapan	SRIANINGSIH	DG 1401

Halaman 142 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



	lembar scan	copy	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)		T
187	1 lembar scan	(satu) copy	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BAMBANG HARYANTO, Spd	DG 1400 T
188	1 lembar scan	(satu) copy	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
189	1 lembar scan	(satu) copy	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	RSUD MABA	DG 8100 HT
190	1 lembar scan	(satu) copy	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
191	1 lembar scan	(satu) copy	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BPKAD KAB. HALTIM	DG 1003 TP
192	1 lembar scan	(satu) copy	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	BPKD HALTIM	DG 1004 TP
193	1 lembar scan	(satu) copy	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ABDULLAH MOLOGOTU	DG 1412 T
194	1 lembar scan	(satu) copy	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ARIS BUDIYONO	DG 1007 UT
195	1 lembar scan	(satu) copy	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	LATIFA DJAILAN	DG 1413 T
196	1 lembar scan	(satu) copy	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	DINAS KESEHATAN KAB. HALTIM	DG 9001 TP
197	1 lembar scan	(satu) copy	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MUNIR Hi. SALIM	DG 1418 T



		1)		
198	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SEKRETARIAT DPRD KAB.HALTIM	DG 1006 TP
199	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SEKRETARIAT DPRD KAB.HALTIM	DG 1007 TP
200	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SAFRI ANDI	DG 1012 UT
201	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MOHAMAD ALI SODIKIN	DG 1423 T
202	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MUSLIM DJURUBASA	DG 1429 T
203	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	SENDI PAIDUN	DG 1412 T
204	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MAJID DJINA	DG 1437 T
205	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	AAN RIYADI	DG 1438 T
206	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	ISMAIL DJURU BASA	DG 1452 T
207	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	MISNAINI	DG 1461 T
208	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)	YORDAN LABUANG	DG 1466 T
209	1 (satu) lembar copy scan	Surat Ketetapan Pajak Daerah	BURHAN HI. ADAM	DG 1467 T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	scan	PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 1)		
210	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 1404 T
211	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PT. ADHITA NIKEL INDONESIA	DG 8502 T
212	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RSUD MABA	DG 8100 HT
213	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4614 T
214	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4620 T
215	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MOH. KANDUNG	DG 2817 TB
216	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET H	DG 2842 TB
217	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURYONO	DG 4644 T
218	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AYU NISMAWATI	DG 2851 TA
219	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARNI	DG 5260 T
220	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	BAMBANG SLAMET SISWANTO	DG 2128 TD

Halaman 145 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



221	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RONAL TOLOAN	DG 1415 T
222	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FEBRI RAHARDIANTO	DG 2206 TD
223	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURSIA SALEH	DG 1419 T
224	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI DESIYANTI	DG 2293 TD
225	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ANADA ROSY ISWAHYUDI	DG 2340 TD
226	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURSANTI ADE	DG 5033 TA
227	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMIT PASSY	DG 3987 TB
228	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RASITO	DG 6337 T
229	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDURAHMAN HAIRUDIN	DG 3904 TB
230	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IBRAHIM MALIK	DG 3902 TB
231	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SALMAN AL FARIS	DG 3903 TB
232	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	SRI WAHYUNI	DG 3990 TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
233	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASIAH	DG 3992 TB
234	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RIFKA PUTRI PRATAMI	DG 2012 TD
235	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RITA SALIHI	DG 5040 TA
236	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMAIL DJURUBASA	DG 5045 TA
237	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAMIUN FACATLE	DG 2014 TD
238	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DESA TELAGA JAYA	DG 2339 HT
239	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD DJAILAN	DG 5041 TA
240	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURWADI	DG 2011 TC
241	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UCI SANUSI	DG 2001 TC
242	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTOMO AYUB	DG 3997 TB
243	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	CUCU ASMANA	DG 3994 TB
244	1 (satu)	Surat Ketetapan	RAIS GUAMO	DG 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembar Asli	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		TC
245	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KASBUN	DG 3995 TB
246	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	BOBI TUNANG	DG 2008 TC
247	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUHARTI MARSIDIK	DG 3996 TB
248	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARMEON KALAKA	DG 2022 TD
249	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NENENG GITA WAHYUNI	DG 2068 TD
250	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LASER PANDAPOTAN GULTOM	DG 2010 TC
251	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAMID SENEN	DG 3988 TB
252	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ATI KUESTINAH	DG 2006 TC
253	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LATIFA DJAILAN	DG 3991 TB
254	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAMANIA PAUWAH,S.AG	DG 3998 TB
255	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	EKO SUDARMASIH	DG 2004 TC

Halaman 148 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



		3)		
256	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RASMIYEM	DG 2007 TC
257	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAIMAN	DG 2003 TC
258	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SATUNI	DG 2032 TD
259	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YOHNIS TERU	DG 2009 TC
260	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET ARIFIN	DG 2046 TD
261	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURNOMO	DG 2086 TD
262	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDUL MUZARAB AZIZ	DG 1211 T
263	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RISNO	DG 3961 TB
264	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YARNI SURYANA TEA	DG 3962 TB
265	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRIYANI	DG 3967 TB
266	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMIT HI.MA'BUD	DG 3974 TB
267	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah	WAGIYAH	DG 2031 TD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		
268	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHTAR HAJI MUHAMAD	DG 2047 TD
269	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARWAN HASAN	DG 3712 TB
270	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YELFIANA SUSU	DG 3775 TB
271	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARSELUS MOI LEUWAYAN	DG 3931 TB
272	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISMAIL DJURUBASA	DG 3717 TB
273	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADRI POUI	DG 3872 TB
274	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HERUN PURNAMI	DG 3934 TB
275	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ARDI MAULANA	DG 3754 TB
276	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KENG KAMARIBA	DG 2103 TD
277	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	REYNOLD ANDRE TUMALANG	DG 2104 TD
278	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DARLISA HI.ALI	DG 2093 TD

Halaman 150 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RUBIYATI	DG 2094 TD
280	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUGENG	DG 3868 TB
281	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ANDI YANI	DG 3713 TB
282	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YOFENUS M. BUDIMAN	DG 2059 TD
283	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MAJID DJINA	DG 2126 TD
284	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ISBAT HAMJAH	DG 2073 TD
285	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HENGKI KAOI	DG 3941 TB
286	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI RAHAYU	DG 2108 TD
287	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET	DG 2110 TD
289	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WANDONO	DG 2113 TD
290	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUSTINA MUJIB	DG 2117 TD
291	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	SUPARMIWATI	DG 2120 TD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
292	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MESERI	DG 2124 TD
293	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADE SALMAN,SKM.M,K ES	DG 3774 TB
294	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KARTINI	DG 3867 TB
295	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PARWATI	DG 2080 TD
296	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WASIS AMANTO	DG 2083 TD
297	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RETNO	DG 2085 TD
298	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUKARDI SONINGA	DG 2123 TD
299	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SEFETUNA MOTJOR	DG 3776 TB
300	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WENAS SALASA	DG 3871 TB
301	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YAPET MANGENGEDE BARAHAMA	DG 3707 TB
302	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RISTINA STIORINI	DG 3870 TB
303	1 (satu)	Surat Ketetapan	NONCE DIAS	DG 3694

Halaman 152 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



	lembar Asli	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		TB
304	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FITRIANI HUSIN	DG 2144 TD
305	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LA ODE MAZRIN	DG 2190 TD
306	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HASIM LA ABU	DG 2150 TD
307	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YANCE ANO	DG 2148 TD
308	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MELKIANUS NABI	DG 2149 TD
309	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DESA TANURE	DG 2007 TP
310	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAIKAL SYUKUR	DG 2084 TD
311	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SENI SURYANI	DG 2116 TD
312	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WIDOYONO	DG 2207TD
313	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAKARTIKA	DG 2107 TD
314	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	EDY HARTONO	DG 2114 TD



		3)		
315	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARIFATU HASANA	DG 2118 TD
316	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	THOYIBAH	DG 2119 TD
317	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IRWANTO KAHAR	DG 2154 TD
318	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUS SUYATNO	DG 2115 TD
319	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADI SUNARTO	DG 2079 TD
320	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MAHRONI	DG 2125 TD
321	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUAIB H. TAMSIL	DG 2082 TD
322	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASEHAT	DG 2139 TD
323	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ABDUL KADER SALASA	DG 2122 TD
324	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MIAN	DG 3968 TB
325	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YERMIAS LAUMBUR Y	DG 2011 TD
326	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah	AHMAD FAHROZI	DG 2015 TD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		
327	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	FAIDIN MUHAMAD	DG 2016 TD
328	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HIRWAN A.RAHMAN	DG 2013 TD
329	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SLAMET MULYANTO	DG 2034 TC
330	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURDIN HADI	DG 1409 T
331	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SOLATUN	DG 2201 TD
332	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WILIAM LEMONTJINA	DG 3970 TB
333	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NASIRUN	DG 3972 TB
334	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WIDODO	DG 2196 TD
335	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	TONY HARTONO	DG 6331 T
336	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHAMAD CHIRUL ANWAR	DG 8099TU
337	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YUDI SETIAWAN EFENDI	DG1801 TU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WANISA UAT	DG 1297 T
339	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AHMAD BARMAWI	DG 5131 T
340	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUPRIADI UMAR	DG 5380 T
341	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UGENG SETIONO	DG 8417 T
342	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	JOKO WAHAB	DG 8103 TU
343	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	ADNAN HASANUDIN, ST	DG 1402 T
344	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUSANA	DG 8001 UT
345	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PONIMIN, SPD	DG 1403 T
346	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTIYAH	DG 8187 T
347	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	H. SITI MAWANI	DG 1407 T
348	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SRI ASTINI	DG 8002 UT
349	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	HJ. SITI MAWANI	DG 8506 T

Halaman 156 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)		
350	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	LASANE LAHAJI	DG 8506 T
351	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	RAMLY MARASABESSY	DG 1006 UT
352	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUTRISMAN	DG 8510 T
353	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAHRAN UAT	DG 2206 T
354	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	YANTO SUNARYO	DG 2937 TB
355	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KANTOR DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN	DG 2203
356	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SYUKUR WASHAB	DG 5706 T
357	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHAMAD ANSAR	DG 2779TB
358	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SABINGATUN	DG 2516 T
359	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NURIYONO	DG 6207 7
360	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PURNOMO	DG 5488 T

Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AGUS SALIM	DG 5334 T
362	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WAHYU NINGSIA BAHKUDIN	DG 2760 TA
363	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	QOBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
364	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	QUBUL BUDIMAN	DG 2655 TA
365	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	KASTAM	DG 2331 TB
366	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MISITUN	DG 8102 T
367	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MANOPO ABD KADIR	DG 1210 T
368	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	PEMERINTAH KAB. HALTIM	DG 134 HT
369	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	UDIN ALI	DG 5075 T
370	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	VERA TANDEAN	DG 6018 T
371	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HENDRI PAIDUN	DG 2414 TB
372	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan	DINAS PERHUBUNGAN DAN	DG 160 HT

Halaman 158 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SWDKLLJ (lembar 3)	TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	
373	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 157 HT
374	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5280 HT
375	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5283 HT
376	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5281 HT
377	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PEMDA HALTIM	DG 5278 HT
378	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SUKIR	DG 2966 TA
379	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SAMIADI	DG 8052 T
380	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	IKRAM SYAFI	DG 5428 T
381	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MUHTAR TOMAIDI, SE	DG 8509 T
382	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	HAMID SABAN	DG 5390 T
383	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	GAZALI M TAHIR	DG 25II TB
384	1 (satu)	Surat Ketetapan	ARNI AMINUDIN	DG 2762

Halaman 159 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembar Asli	Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)		TA
385	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	MARSINO	DG 2906 TA
386	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	AAN RIYADI. S.SOS	DG 2722 TB
387	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	SALMA YUSUF	DG 2530 TA
388	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	NAHROWI	DG 8005 UT
389	1 (satu) lembar Asli	Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (lembar 3)	WADUD KIPU	DG 2074 TD
390	Asli 1 (satu) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Januari 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
391	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan April 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
392	Copy 1 (satu) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Mei 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
393	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Juni 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
394	Copy 2 (dua) bundel	Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Realisasi Bulan Juli 2018. - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Bea Balik Nama Bermotor (BBNKB)		
395	Copy 1 (satu) lembar STNKB No Seri 00603974 dan copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sementara atas nama RAHEL DESI RESIMARAN dengan No.Pol. DG 8024 UT dengan jumlah sebesar Rp. 31.958.000,-			
396	Copy 1 (satu) lembar STNKB No Seri 12816460 dan copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sementara atas nama ABDUL RAHIM ASRI dengan No.Pol. DG 8011 UT dengan jumlah sebesar Rp. 18.931.000,-			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000
(Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari **SENIN** tanggal 8 Maret 2021, oleh kami **ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.** dan **AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal 9 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENONG KAILUL**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh **HADIMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENONG KAILUL.

Halaman 161 dari 161 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte